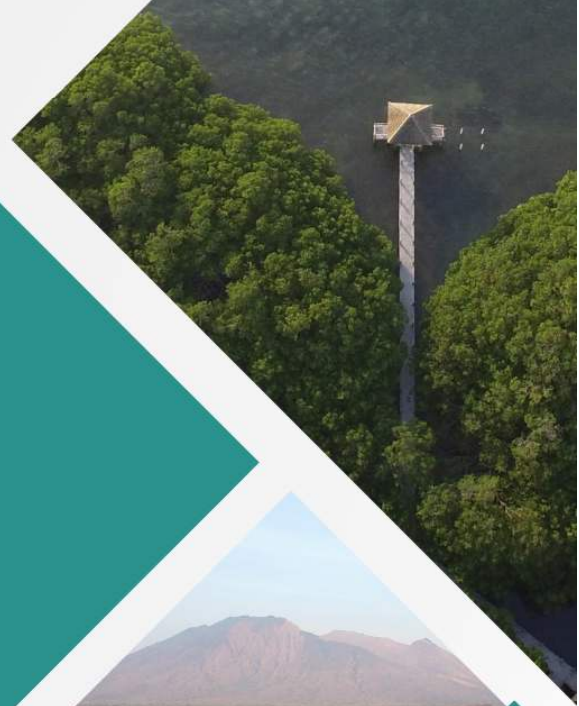




BALAI TAMAN NASIONAL
BALURAN

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029





KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN

NOMOR : SK.35 Tahun 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan dan untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Baluran tentang Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN TAHUN 2025 - 2029.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2025-2029 di satuan kerja Balai Taman Nasional Baluran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 30 Desember 2025
KEPALA BALAI,



AGUS SETYABUDI
NIP. 19820814 200604 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
3. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik.
4. Direktur Perencanaan Konservasi.
5. Direktur Konservasi Kawasan.
6. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
7. Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi.

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025-2029 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai TN Baluran dalam mendukung pencapaian sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Renstra ini disusun sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan pada Balai TN Baluran. Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Program KSDAE dari kegiatan beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasarnya secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi-manfaat untuk kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Renstra Balai TN Baluran Tahun 2025-2029 ini menjabarkan strategi pencapaian sasaran dan target kinerja kegiatan. Strategi dimaksud meliputi jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian output. Seluruh kegiatan dan proses komponen input yang tertuang dalam Rencana Strategis ini merupakan arahan dan acuan bagi Balai TN Baluran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang akan dipedomani bersama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	1
Sejarah Kawasan Taman Nasional Baluran	1
Kondisi Geografis dan Administratif.....	2
Kondisi Fisik, Sosial, dan Ekologi Kawasan	2
Keanekaragaman Hayati	2
Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat.....	3
Potensi Kawasan	5
Mandat Pengelolaan kawasan.....	7
Struktur Organisasi.....	8
Alokasi Anggaran.....	9
1.2. Capaian Kinerja	11
1.3. Potensi dan Tantangan	12
BAB II.....	13
2.1. Visi dan Misi Kementerian Kehutanan	13
Visi Kementerian Kehutanan.....	13
Misi Kementerian Kehutanan.....	14
Tujuan Kementerian Kehutanan	14
Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan	14
2.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal KSDAE	15
Misi Direktorat Jenderal KSDAE	16
2.3. Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029	17
2.4. Identifikasi Risiko Sasaran Program	20
Sasaran Program 1	20
Sasaran Program 2	23
Sasaran Program 3	24
2.5. Tonggak Pencapaian (<i>Milestone</i>) Pembangunan.....	25
BAB III	28
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	28

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan	29
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE	32
3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Balai TN Baluran.....	37
BAB IV	38
4.1. Target Kinerja	38
4.2. Target Kinerja Balai Taman Nasional Baluran	42
4.3. Kerangka Pendanaan	51
BAB V	53
LAMPIRAN	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sejarah Kawasan Taman Nasional Baluran	1
Gambar 2. Grafik monitoring Banteng.....	3
Gambar 3. Peta Desa Penyangga Taman Nasional Baluran.....	4
Gambar 4. Realisasi PNPB dan Jumlah Kendaraan di TN Baluran.....	6
Gambar 5. Benchmarking ke Desa Ketapanrame dan Pujon Kidul	7
Gambar 6. Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Baluran.....	8
Gambar 7. Presentase dan Jumlah Pegawai	9
Gambar 8. Diagram Batang Perbandingan Pagu dan Realisasi.....	10
Gambar 9. Grafik Realisasi Anggaran 2020 - 2024.....	10
Gambar 10. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029.....	13
Gambar 11. Tema Direktorat Jenderal KSDAE 2025 - 2029	15
Gambar 12. Misi Direktorat Jenderal KSDAE	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kunjungan Wisata di Taman Nasional Baluran Tahun 2019 - 2024	6
Tabel 2. Capaian Kinerja TN Baluran Periode 2020 - 2024	11
Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.....	18
Tabel 4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE	19
Tabel 5. Kontribusi/Aksi Nyata Balai TNB terhadap Sasaran Program dan IKP Ditjen KSDAE	19
Tabel 6. Identifikasi dan Mitigasi Risiko Balai TN Baluran berdasarkan kontribusinya pada tiga Sasaran Program Ditjen KSDAE	25
Tabel 7. Tabel Milestone Pembangunan Balai TN Baluran berdasarkan kontribusinya pada Milestone Pembangunan Ditjen KSDAE	26
Tabel 8. Intervensi Direktorat Jenderal KSDAE dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan	32
Tabel 9. Indikator Kinerja RPJMN Tahun 2025-2029 pada Direktorat Jenderal KSDAE.....	38
Tabel 10. Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029	39
Tabel 11. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 1	40
Tabel 12. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 2.	40
Tabel 13. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 3.	41
Tabel 14. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen.....	41
Tabel 15. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai TN Baluran Untuk Kegiatan Direktorat Perencanaan Konservasi.	43
Tabel 16. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai TN Baluran Untuk Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan.	46
Tabel 17. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai TN Baluran Untuk Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.....	48
Tabel 18. Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai TN Baluran Untuk Kinerja Kegiatan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan.	49
Tabel 19. Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai TN Baluran Untuk Kinerja Kegiatan Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi.	50
Tabel 20. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai TN Baluran Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.	51
Tabel 21. Kerangka Pendanaan Target Kinerja Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025-2029.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sejarah Kawasan Taman Nasional Baluran

Eksistensi kawasan Baluran dalam kesejarahannya diawali pada tahun 1920 dengan usulan pencadangan hutan Bitakol seluas ± 1.553 Ha untuk ditetapkan sebagai areal hutan produksi tanaman jati (jatibosch) (Wind dan Amir, 1977). Upaya konservasi kawasan Baluran telah dilakukan sejak lama pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Rintisan penunjukannya menjadi suaka margasatwa telah dilakukan oleh Kebun Raya Bogor sejak tahun 1928. Rintisan tersebut didasarkan pada usulan A.H. Loedeboer (pemegang konsesi lahan perkebunan pada sebagian kawasan Baluran di daerah Labuhan Merak dan Gunung Mesigit pada saat itu).

Pada tanggal 23 Januari 1930 diterbitkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 83 (Gouvernement Besluit van 23 Januari 1930, No. 83) Baluran ditetapkan sebagai Hutan Lindung (Boschreserve) Baru kemudian pada tanggal 25 September 1937, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 9, Lembaran Negara Hindia Belanda 1937, No. 544 (Besluit van Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië van 25 September 1937, No. 9, Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1937, No. 544), areal Baluran ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa (wildreservaat) seluas ± 25.000 ha.

Pada tanggal 6 Maret 1980 bertepatan dengan pelaksanaan kongres Taman Nasional sedunia di Bali, Kawasan Baluran termasuk menjadi salah satu dari 5 (lima) kawasan yang dideklarasikan sebagai taman nasional oleh Menteri Pertanian seluas ± 25.000 Ha. Yang kemudian penunjukan secara resmi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 279/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 seluas ± 25.000 Ha. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 279/Kpts-VI/1997 ini secara resmi merubah status kawasan Baluran yang semula Suaka Margasatwa menjadi Taman Nasional.



Gambar 1. Sejarah Kawasan Taman Nasional Baluran

Kondisi Geografis dan Administratif

Balai Taman Nasional Baluran adalah Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. Seluruh perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kawasan harus sesuai dengan arah kebijakan nasional, seperti yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2025–2029. Balai Taman Nasional terbagi kedalam 2 pengelolaan Nasional yaitu Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) adalah SPTN Wilayah I Bekol dan SPTN Wilayah II Karangtekok.

Taman Nasional Baluran terletak di antara 7°29'–7°55' Lintang Selatan dan 114°17'–114°28' Bujur Timur, dan mewakili ekosistem kering di bagian timur Pulau Jawa. Taman Nasional Baluran merupakan salah satu kawasan konservasi paling penting di Indonesia karena karakteristik ekologisnya yang unik. Kawasan ini terdiri dari wilayah pesisir hingga kaki Gunung Baluran, sebuah gunung api purba yang tidak aktif yang berfungsi sebagai komponen geomorfologi utama yang membentuk lanskap. Geometri tanah, jenis tanah, dan pola vegetasi yang berkembang di wilayah tersebut dipengaruhi oleh keberadaan gunung ini. Dengan musim kemarau selama enam hingga delapan bulan, Baluran memiliki curah hujan tahunan rata-rata hanya 900–1.200 mm, dan berada di ujung timur Pulau Jawa, Baluran menjadi salah satu tempat dengan curah hujan terendah di Jawa.

Topografi Baluran terdiri dari kombinasi dataran rendah pesisir, dataran savana tengah, dan lereng perbukitan hingga hutan evergreen. Lebih dari empat puluh jenis ekosistem, termasuk hutan pantai, mangrove, padang lamun, savana, hutan musim, dan evergreen, diidentifikasi dalam Rangkaian Ekosistem Alami Taman Nasional Baluran pada tahun 2023. Tanah-tanah di daerah ini adalah jenis tanah mediteran, grumosol, dan regosol vulkanik yang cenderung kering dan berkapasitas kelembapan rendah, yang berdampak besar pada proses pemulihan vegetasi savana. Secara hidrologi, Baluran sangat bergantung pada air hujan karena tidak memiliki aliran sungai permanen. Sungai musiman dan cekungan air seperti Bekol, Bama, dan Tanjung Sumberwaru sangat penting bagi satwa liar. Selama musim kemarau ekstrem, cekungan air mengalami penurunan yang signifikan, yang meningkatkan risiko kompetisi pakan dan gangguan manusia terhadap satwa liar (Statistik TNB 2023).

Kawasan Baluran sangat strategis untuk diakses karena berada di jalur pantura Surabaya–Banyuwangi–Bali. Meskipun ini memudahkan mobilitas, hal ini juga meningkatkan risiko gangguan di daerah tersebut. Perburuan, penggembalaan liar, dan pemungutan kayu bakar masih terjadi karena akses ke wilayah terbuka. Kondisi geografis dan administratif Baluran mencerminkan lanskap konservasi, yang memiliki karakteristik ekologi kering yang berbeda, tekanan sosial-ekologis yang kompleks, dan tantangan pengelolaan.

Kondisi Fisik, Sosial, dan Ekologi Kawasan

Keanekaragaman Hayati

Taman Nasional Baluran memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi kawasan konservasi penting dalam konteks perlindungan satwa liar dan ekosistem kering tropis. Fauna kunci seperti banteng jawa, rusa timor, kijang, macan tutul, babi hutan, dan kerbau liar menjadi indikator kesehatan savana. Populasi banteng mengalami fluktuasi akibat penurunan rumput pakan, invasi vegetasi asing, dan kompetisi pakan dengan ternak yang masuk secara ilegal ke kawasan (Statistik TNB 2023, Rencana Pemulihan ekosistem 2020-2024). Banteng, sebagai satwa prioritas nasional, sangat

bergantung pada ketersediaan pakan berkualitas tinggi, yang saat ini menurun secara nyata akibat ekspansi *Vachellia nilotica*.



Gambar 2. Grafik monitoring Banteng

Selain mamalia besar, Baluran merupakan habitat penting bagi lebih dari 196 spesies burung, termasuk merak hijau, cekakak, ayam hutan, burung pemangsa, dan berbagai jenis burung migran yang memanfaatkan jalur migrasi *East Asian–Australasian Flyway*. Keberadaan burung-burung ini mencerminkan pentingnya ekosistem savana, hutan musim, dan pesisir Baluran dalam jaringan konservasi kawasan burung (IBA). Reptil seperti biawak, ular sanca, ular sendok, dan berbagai kadal savana memperkaya keanekaragaman fauna darat. Ekosistem pesisir juga menjadi habitat penting bagi biota laut seperti ikan karang, krustasea, dan burung air.

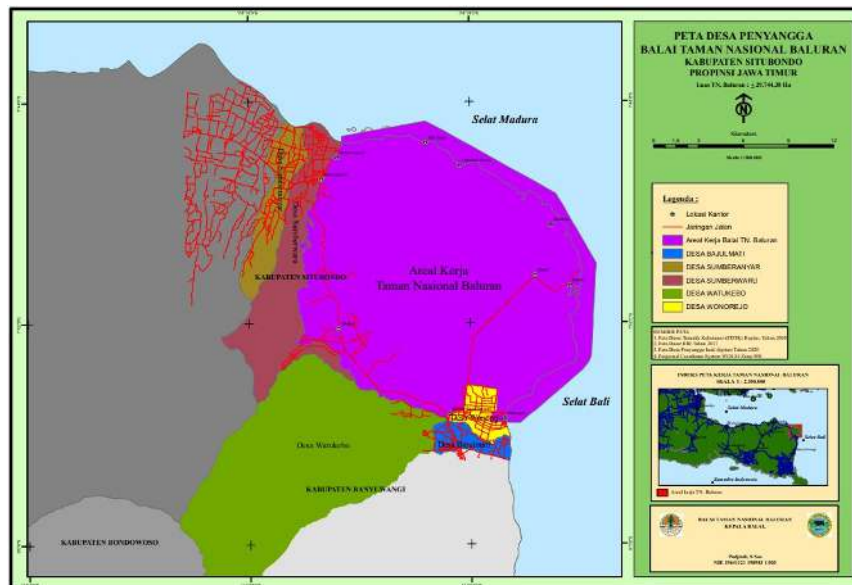
Keragaman flora Baluran mencakup ratusan jenis tumbuhan yang tersebar di berbagai formasi ekosistem. Savana didominasi oleh rumput pakan seperti *Heteropogon contortus* dan *Themeda arguens*, namun terancam oleh penyebaran spesies invasif seperti *Vachellia nilotica*, *Chromolaena odorata*, dan *Lantana camara*. Vegetasi hutan musim menyediakan kanopi, naungan, dan sumber pakan alternatif bagi satwa liar, sementara hutan evergreen di daerah yang lebih tinggi menjaga iklim mikro dan menjadi habitat bagi fauna arboreal seperti lutung dan berbagai jenis burung hutan.

Ekosistem pesisir Baluran yang meliputi mangrove, padang lamun, dan terumbu karang memperkaya keanekaragaman hayati kawasan. Statistik TNB 2023 mencatat keberadaan mangrove seluas 1.131 hektare yang menjadi habitat penting bagi burung air dan biota akuatik. Padang lamun mendukung proses pemijahan ikan, sedangkan terumbu karang menyediakan tempat berlindung bagi biota laut. Hubungan ekologis pesisir-daratan memperkuat fungsi Baluran sebagai lanskap konservasi yang komprehensif.

Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Kawasan TN Baluran berbatasan dengan 5 (lima) desa penyangga yang mengelilingi kawasan pelestarian alam tersebut. Kelima desa tersebut, yaitu; Desa Sumberanyar, Desa Sumberwaru, Desa Wonorejo, Desa Watukebo dan Desa Bajulmati. Desa yang paling dekat jaraknya dengan kawasan hutan TN Baluran adalah Desa Sumberwaru dan Desa Wonorejo yang masing-masing desanya langsung berbatasan dengan hutan. Kelima desa tersebut secara administratif terbagi ke dalam dua kabupaten yaitu Kabupaten Situbondo (Sumberanyar, Sumberwaru dan Wonorejo) dan Kabupaten Banyuwangi (Watukebo dan Bajulmati)

Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar Taman Nasional Baluran merupakan komponen penting dalam memahami dinamika pengelolaan kawasan, mengingat keberadaan desa-desa penyangga yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam kawasan. Desa-desa seperti Wonorejo, Sumberwaru, Banyuputih, Wongsorejo, dan wilayah lain di Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi memiliki sejarah panjang interaksi dengan kawasan, baik dalam bentuk pemungutan kayu bakar, pengambilan pakan ternak, penggembalaan liar, maupun akses tradisional lainnya. Statistik Taman Nasional Baluran 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa penyangga bekerja di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan pekerjaan informal dengan keterkaitan langsung terhadap kondisi ekosistem Baluran.



Gambar 3. Peta Desa Penyangga Taman Nasional Baluran

Ketergantungan ini menjadikan Baluran sebagai sumber penting pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, bentuk-bentuk pemanfaatan tersebut juga menimbulkan tekanan terhadap kawasan, seperti penggembalaan liar yang memberikan dampak signifikan pada daya dukung savana. Pada laporan kinerja Taman Nasional Baluran 2024 tercatat bahwa aktivitas penggembalaan liar masih terjadi secara rutin pada musim kemarau, ketika masyarakat melepas ternak untuk mencari pakan di savana. Kehadiran ternak dalam jumlah besar meningkatkan risiko kompetisi pakan dengan banteng dan rusa, memperburuk degradasi padang rumput, serta meningkatkan potensi penularan penyakit antar-satwa. Selain itu, aktivitas pemungutan kayu bakar, pengambilan rumput, dan perburuan juga terjadi meskipun telah menurun dibandingkan dekade sebelumnya. Konflik manusia-satwa merupakan isu yang cukup sering muncul, terutama pada musim kemarau ketika satwa seperti babi hutan dan kera masuk ke lahan pertanian dan permukiman.

Dari sisi potensi ekonomi, kawasan Baluran memiliki daya tarik wisata yang besar, seperti Savana Bekol, Pantai Bama, hingga kawasan hutan evergreen dan bentang pesisir. Potensi ini membuka peluang pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, termasuk usaha pemandu wisata, penyediaan jasa transportasi, makanan-minuman, homestay, dan produk kerajinan lokal. Berdasarkan Statistik 2023 menunjukkan peningkatan signifikan kunjungan wisatawan setelah pandemi, menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat desa penyangga apabila dikelola dengan baik melalui kemitraan konservasi dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal.

Dinamika sosial budaya masyarakat di sekitar Baluran juga membentuk pola hubungan mereka terhadap kawasan konservasi. Terdapat norma-norma lokal terkait penggunaan lahan dan pengembalaan tradisional yang sering kali bertentangan dengan aturan konservasi. Implementasi kemitraan konservasi oleh KSDAE mulai membuka peluang akses legal yang lebih terkontrol, namun RPE 2020–2024 menegaskan perlunya peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, pendampingan teknis, serta penyelarasan pemahaman antara masyarakat dan pengelola kawasan.

Aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat penyangga merupakan determinan penting dalam pengelolaan Baluran. Pemberdayaan masyarakat, penguatan kemitraan konservasi, pengurangan ketergantungan terhadap sumber daya kawasan, serta penyediaan alternatif mata pencaharian menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan untuk periode Renstra 2025–2029.

Potensi Kawasan

Taman Nasional Baluran memiliki potensi dan nilai penting kawasan yang besar dalam aspek ekologi, ekonomi, sosial, pendidikan, dan penelitian. Nilai-nilai penting tersebut mencakup aspek ekologis, geologis, hidrologis, sosial, dan budaya. Nilai-nilai penting kawasan Taman Nasional Baluran diantaranya berupa: Pusat Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang merupakan mandat utama pengelolaan kawasan pelestarian alam; Perlindungan Ekosistem Peralihan yang memiliki ekosistem lengkap dari Pantai sampai dengan pegunungan; Keunikan Vegetasi; Fenomena Geologi Spektakuler; Ritual, dan Kearifan Lokal; sebagai wadah Edukasi dan Penelitian. Nilai-nilai ini juga diperkuat dengan pengakuan internasional sebagai UNESCO Biosphere Reserve. Dari sisi ekologi, Baluran merupakan salah satu representasi terbaik ekosistem kering tropis di Indonesia, terutama melalui keberadaan savana yang luas dan menjadi habitat penting bagi satwa liar seperti banteng, rusa, kijang, dan merak hijau. Keunikan ekosistem savana ini memberikan peluang besar untuk program pemulihan ekosistem dan pengelolaan habitat secara lanskap, sebagaimana direkomendasikan dalam Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) 2020–2024. Program tersebut mencakup pengendalian vegetasi invasif, peningkatan kualitas padang rumput pakan, serta penguatan pengelolaan kebakaran yang berbasis sains.

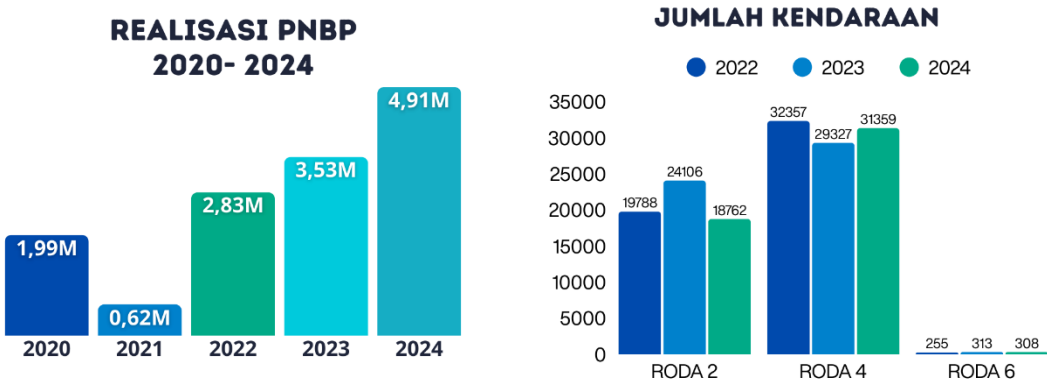
Potensi kawasan juga terlihat dari keberadaan ekosistem pesisir yang mencakup mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Statistik Taman Nasional Baluran tahun 2023 mencatat luas mangrove sebesar 1.131 hektare yang berfungsi sebagai habitat penting bagi burung air, tempat pemijahan ikan, serta melindungi pesisir dari abrasi dan intrusi air laut. Ekosistem padang lamun mendukung biota laut seperti ikan pelagis kecil dan moluska, sementara terumbu karang menjadi habitat bagi beragam ikan karang dan organisme laut lainnya. Ketiga ekosistem pesisir ini memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata bahari, penelitian, dan pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan.

Dari aspek pemanfaatan wisata alam, Baluran memiliki daya tarik unggulan seperti Savana Bekol, Pantai Bama, dan kawasan hutan evergreen yang telah dikenal secara nasional maupun internasional. Kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Baluran menunjukkan tren positif atau mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan kontribusi terhadap PNPB Balai Taman Nasional Baluran.

Tabel 1. Kunjungan Wisata di Taman Nasional Baluran Tahun 2019 - 2024

No	Wisatawan	Tahun						Rata-Rata / Tahun	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Nusantara	244.461	101.567	30.632	148.079	182.328	186.721	148.965	98,79%
2	Mancanegara	1.440	234	40	747	1.953	6.530	1.824	1,21%
	Total	245.901	101.801	30.672	148.826	184.281	193.251	150.789	100%

Data internal Balai TN Baluran menunjukkan pertumbuhan jumlah pengunjung pascapandemi, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa penyangga melalui pengembangan usaha pemandu wisata, transportasi lokal, kuliner, homestay, hingga produk kerajinan berbasis konservasi. Potensi wisata ini dapat berkembang optimal melalui penerapan konsep ekowisata, penguatan kapasitas masyarakat, dan penataan kawasan wisata berdasarkan prinsip daya dukung dan daya tampung ekologis.



Gambar 4. Realisasi PNB dan Jumlah Kendaraan di TN Baluran

Dari aspek penelitian dan pendidikan, Baluran merupakan laboratorium alami bagi berbagai studi ekologi savana, dinamika populasi satwa liar, pemulihan habitat, dan dampak perubahan iklim. Kompleksitas ekosistem Baluran memungkinkan pengembangan penelitian jangka panjang mengenai interaksi vegetasi, hidrologi, dan satwa liar. Penguatan fasilitas penelitian seperti kamera trap, drone pemantau, dan sistem informasi konservasi menjadi peluang strategis untuk memperkuat basis ilmiah pengelolaan kawasan.

Pada sisi sosial ekonomi, potensi pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi, UMKM, dan kegiatan berbasis desa wisata menjadi peluang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap aktivitas ilegal di dalam kawasan. Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2024, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi, meskipun masih memerlukan dukungan pendampingan, pelatihan, dan akses permodalan.



Gambar 5. Benchmarking ke Desa Ketapanrame dan Pujon Kidul

Mandat Pengelolaan kawasan

Balai TN Baluran berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Kementerian Kehutanan mempunyai tugas utama mengelola konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ini dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem secara berkelanjutan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, budidaya, budaya, dan rekreasi.

Dari sisi regulasi, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 serta diubah secara signifikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta Peraturan Presiden RI Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan.

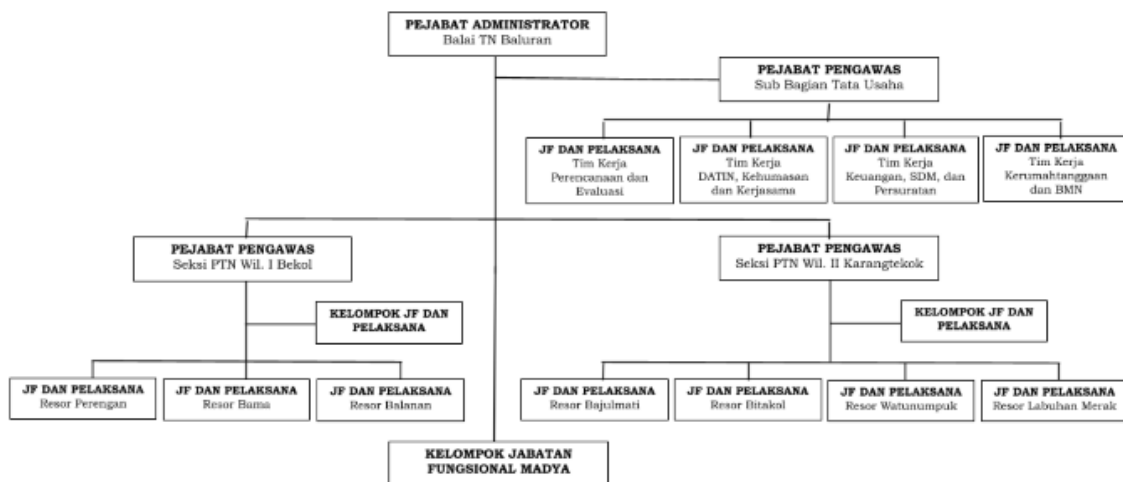
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Ditjen KSDAE, Balai TN Baluran diberikan mandat untuk melaksanakan pengelolaan ksdas di taman nasional serta fasilitasi kegiatan ksdas pada areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Balai TN Baluran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
- c. Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
- d. Pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
- e. Pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik di taman nasional;
- f. Pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
- g. Pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;

- h. Pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di taman nasional;
- i. Evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional;
- j. Pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- k. Penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional;
- l. Penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional;
- m. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- n. Penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
- o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
- p. Pengelolaan kawasan taman nasional; dan
- q. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Struktur Organisasi

Organisasi Balai TN Baluran berdasarkan tipenya merupakan organisasi Balai Taman Nasional tipe B. Organisasi Tipe B dipimpin oleh Kepala Balai (Pejabat Eselon III) dan dibantu Pejabat Eselon IV yaitu 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan 2 (dua) Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional. Selanjutnya dalam rangka pengelolaannya Balai TN Baluran selain dibantu pejabat eselon IV, Kepala Balai juga dibantu pejabat fungsional tertentu / khusus, yang secara garis komando mempunyai tanggung jawab terhadap tugas langsung kepada Kepala Balai.



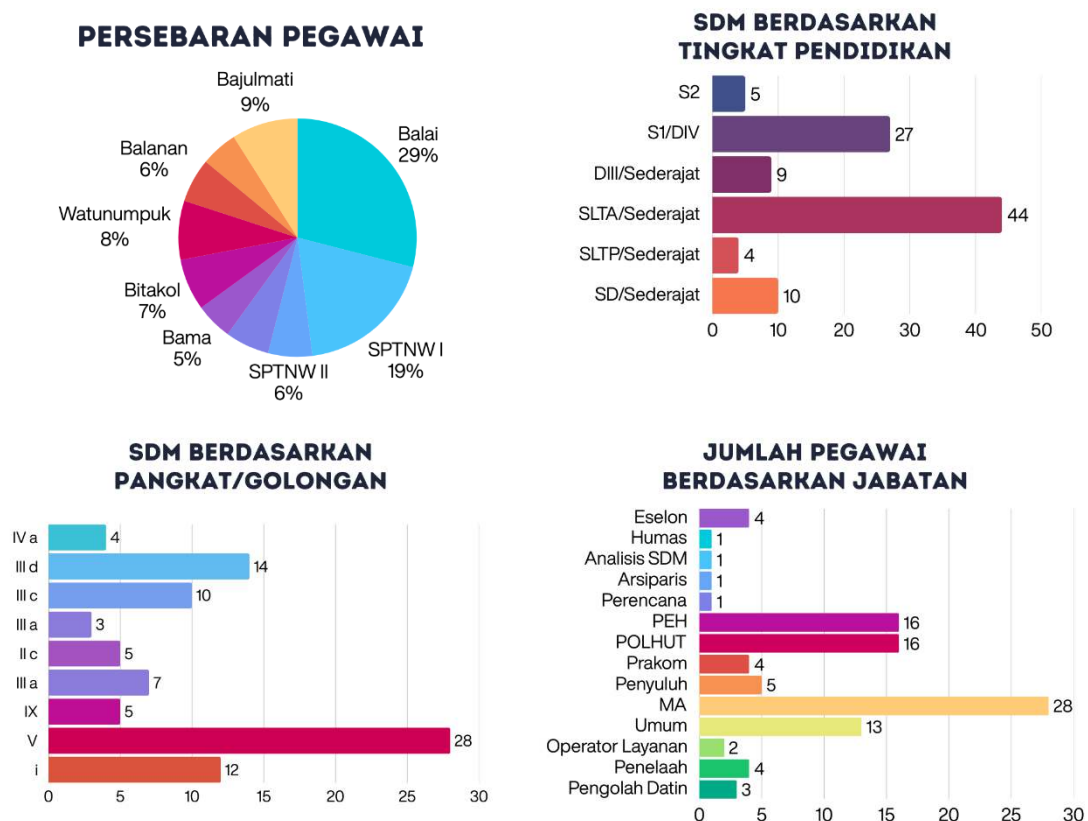
Gambar 6. Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Baluran

Susunan organisasi Balai TN Baluran di dalamnya terdapat tugas yang menjadi tanggung jawab pada setiap unit kerja, tanggung jawab tersebut antara lain terdiri dari :

- a. Kepala Balai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan pelayanan teknis, dan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, perencanaan, kerjasama, pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
- c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan, bimbingan teknis, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kawasan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan lestari, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, pemberantasan penebangan dan peredaran kayu, tumbuhan, dan satwa liar secara ilegal serta pengelolaan sarana prasarana, promosi, bina wisata alam dan bina cinta alam, penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta kerjasama di bidang pengelolaan taman nasional.
- d. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas-tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Taman Nasional Baluran memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 99 Orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga PPPK paruh waktu. Ketersediaan SDM ini memang belum ideal, akan tetapi telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dimana setiap individu disebar sesuai kompetensi dan keahlian di masing-masing Lokasi.

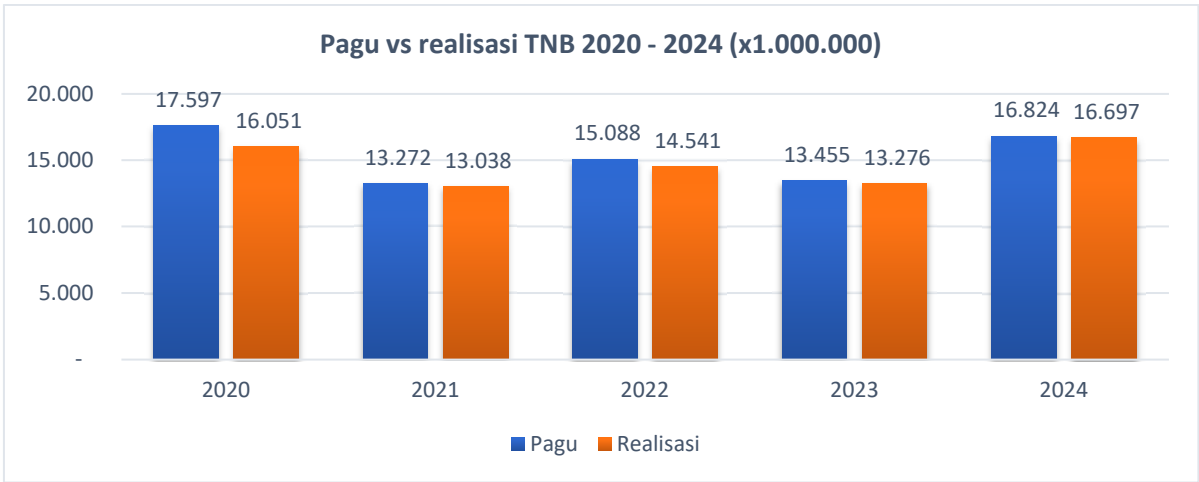


Gambar 7. Presentase dan Jumlah Pegawai

Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Balai TN Baluran yang bersumber dari APBN selama lima tahun terakhir, dari 2020 hingga 2024, mencapai Rp.

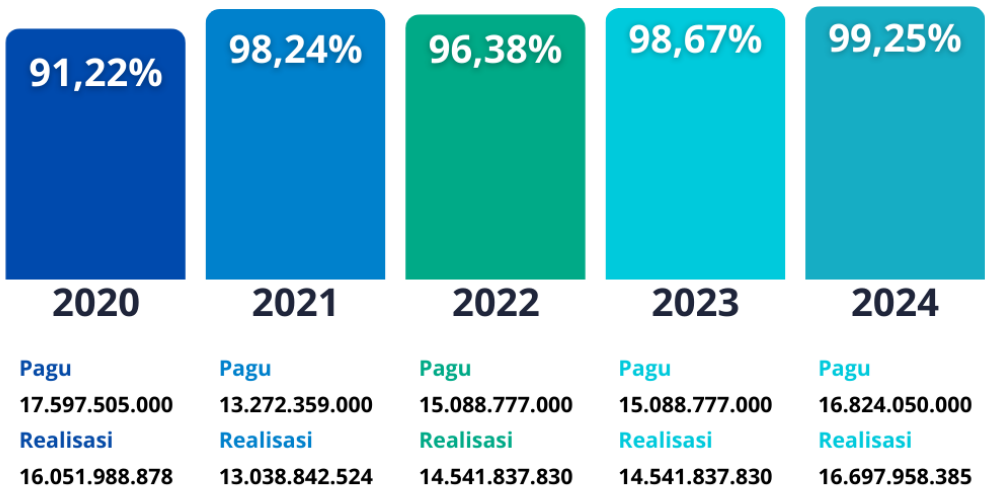
76.238.147.000,-. Realisasi anggaran tersebut sebesar Rp. 73.607.467.799,-, dengan rincian per tahunnya sebagai berikut:



Gambar 8. Diagram Batang Perbandingan Pagu dan Realisasi

Secara umum, jika dibuat grafik penganggaran dari tahun 2020 s/d 2024, terlihat bahwa realisasi anggaran Balai TN Baluran selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, terutama Tahun Anggaran 2024 merupakan realisasi tertinggi selama 5 tahun terakhir dengan capaian serapan sebesar 99,25%. Hal ini mencerminkan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

REALISASI ANGGARAN 2020 - 2024



Gambar 9. Grafik Realisasi Anggaran 2020 – 2024

1.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pengelolaan Taman Nasional Baluran selama lima tahun terakhir (Renstra 2020-2024) didominasi oleh upaya pada program Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Secara ringkas, dalam lima tahun terakhir Balai Taman Nasional Baluran menunjukkan Stabilitas Kinerja Birokrasi yang ditunjukkan Nilai SAKIP dan Capaian Kinerja Total menunjukkan tren naik linier (konsisten tumbuh). Balai TN Baluran berhasil mempertahankan predikat kinerja "Sangat Baik" (>100%) selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus, bahkan saat masa pandemi COVID-19 (2020-2021).

Tabel 2. Capaian Kinerja TN Baluran Periode 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKK)	Satuan	Tahun (Target / Realisasi)				
			2020 (T/R)	2021 (T / R)	2022 (T / R)	2023 (T / R)	2024 (T / R)
1	Nilai SAKIP	Poin	78.00 / 78.65	79.00 / 79.20	79.00 / 79.50	79.50 / 79.50	80.00 / 80.15*
2	Pemulihan Ekosistem	Ha	250 / 250	250 / 250	250 / 250	945 / 945	59 / 59
3	Desa Binaan / Pemberdayaan	Desa	2 / 2	4 / 4	4 / 4	2 / 2	1 / 5
4	Penyelamatan Satwa Liar	Kejadian	-	-	-	2 / 2	2 / 5
5	Perlindungan Kawasan/Kebakaran	Unit	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
6	Wisata Alam Edukasi (SAVE)	Destinasi	-	-	-	1 / 1	1 / 1
7	Kerjasama Kemitraan	Dokumen	-	-	-	1 / 1	1 / 1
Capaian Kinerja Organisasi Total		Persen	106,25%	112,30%	112,08%	114,15%	115,48%

Selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), Balai Taman Nasional Baluran melakukan manajemen lanskap pengelolaan yang penuh tantangan di balik capaian kinerja administratifnya yang tinggi. Hambatan paling fundamental dan bersifat permanen adalah tekanan ekologis yang mengancam integritas habitat utama. Balai menghadapi "perang berkelanjutan" melawan invasi *Vachelia nilotica* (sebelumnya *Acacia nilotica*) yang secara agresif mendegradasi ekosistem savana, mempersempit ruang pakan bagi satwa kunci seperti Banteng Jawa. Situasi ini diperparah oleh variabilitas iklim, khususnya fenomena El Nino pada 2023 dan 2024, yang meningkatkan eskalasi kebakaran hutan. Kondisi ini memaksa manajemen untuk terus-menerus mengalihkan sumber daya anggaran dan tenaga demi pemadaman dan mitigasi darurat, sehingga menghambat fokus pada program pemulihan ekosistem jangka panjang yang lebih terencana.

Di sisi lain, kompleksitas sosial-tenurial menjadi catatan persisten menghambat efektivitas zonasi dan pengamanan kawasan. Klaim lahan historis—seperti eks HGU di Labuhan Merak dan pemukiman Translok AD—yang menciptakan ketidakpastian hukum di beberapa titik kawasan meskipun akhirnya dijadikan zona khusus sebagai salah satu solusi penyelesaian. Tantangan ini berinteraksi dengan tekanan antropogenik harian, di mana aktivitas ilegal seperti penggembalaan liar ternak warga dan insiden perburuan satwa masih terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun program pemberdayaan masyarakat telah berjalan, masih terdapat kesenjangan ekonomi di daerah penyangga yang memicu gesekan antara kebutuhan penghidupan warga dengan tujuan konservasi.

Tantangan-tantangan lapangan tersebut semakin pelik dengan adanya hambatan struktural dan keterbatasan sumber daya. Dari aspek fiskal, Balai Taman Nasional mengalami instabilitas dukungan anggaran akibat faktor eksternal, mulai dari kebijakan refocussing drastis saat pandemi COVID-19 (2020–2021) hingga kebijakan pemblokiran anggaran (*Automatic Adjustment*) yang menghambat

pencairan dana operasional vital. Selain itu, terdapat kesenjangan kapasitas organisasi yang nyata, di mana rasio jumlah personel fungsional (Polhut, Penyuluh dan PEH) tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan 26.164,47 hektar, meskipun beberapa tahun ini telah ditunjang pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan Taman Nasional Baluran. Akumulasi hambatan ini menuntut transformasi kebijakan yang tidak lagi bisa bertumpu pada pendekatan birokratis, melainkan harus beralih ke model kolaborasi multipihak yang lebih adaptif.

1.3. Potensi dan Tantangan

Permasalahan utama pengelolaan Taman Nasional Baluran merupakan hasil interaksi kompleks antara kondisi ekologis yang rapuh, tekanan sosial ekonomi yang terus berlangsung, serta keterbatasan kelembagaan dan pendanaan konservasi. Hasil evaluasi internal Balai dan dokumen-dokumen pengelolaan seperti Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) 2020–2024, Statistik TNB 2023, Laporan Kinerja (LKj) 2024, serta data pendukung PB 2025 mengonfirmasi bahwa tantangan pengelolaan Baluran bersifat multidimensional dan saling memperkuat. Permasalahan paling dominan adalah invasi spesies tumbuhan asing invasif, khususnya *Vachellia nilotica*, yang berkembang pesat pada savana dan mengubah struktur vegetasi secara signifikan. Invasi ini mengancam keberlanjutan savana yang menjadi pusat kehidupan berbagai satwa herbivora.

Permasalahan kedua adalah penurunan daya dukung habitat, terutama savana Bekol dan sekitarnya, yang menjadi habitat utama banteng, rusa, dan satwa pemakan rumput lainnya. Statistik TNB 2023 menunjukkan penurunan kualitas padang rumput dan ekspansi semak invasif yang berdampak pada penurunan kapasitas pakan satwa liar. PB 2025 menyoroti bahwa banteng sebagai spesies prioritas nasional sangat rentan terhadap penurunan kualitas savana dan perubahan ketersediaan air, sehingga memerlukan intervensi manajemen habitat yang serius.

Kebakaran tidak terkendali merupakan permasalahan besar lainnya. LKj 2024 menunjukkan bahwa frekuensi kebakaran meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama pada puncak musim kemarau. Kebakaran yang dipicu aktivitas manusia sering kali terjadi di luar siklus alami savana dan mempercepat degradasi vegetasi pakan, sekaligus memperluas area dominasi semak invasif.

Selain itu, gangguan kawasan melalui penggembalaan liar, perburuan, dan pemungutan kayu bakar masih menjadi tantangan berulang. Penggembalaan liar memberikan dampak langsung pada daya dukung savana dan meningkatkan risiko kompetisi pakan antara ternak dan satwa liar. Kasus perburuan, meskipun menurun, tetap terjadi terutama terhadap rusa dan kijang pada musim kemarau ketika satwa berkumpul di titik air terbatas.

Keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, sarana prasarana, serta kebutuhan peningkatan sistem monitoring dan efektivitas pengamanan menjadi faktor pembatas tambahan. Dengan luas kawasan ±25.000 hektare dan tingkat tekanan eksternal yang tinggi, kebutuhan akan teknologi monitoring seperti kamera trap, drone, serta sistem informasi konservasi yang kuat menjadi sangat penting.

Di sisi lain, perubahan iklim yang memanjangkan musim kemarau dan mengurangi ketersediaan air turut memperparah kondisi ekosistem Baluran, memengaruhi produktivitas vegetasi dan kesehatan satwa liar. Statistik 2023 menunjukkan peningkatan durasi hari kering dan suhu rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi Kementerian Kehutanan

Visi Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Kehutanan menetapkan visi menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mencerminkan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kementerian Kehutanan menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan *balance scorecard*. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian Kehutanan antara lain *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process*, serta *learning and growth*.



Gambar 10. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029

Peta strategi disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian Kehutanan untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029. Melalui peta strategi ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategi ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategi tidak hanya menjadi alat perencanaan dan pengukur kinerja,

tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan menuju tata kelola pembangunan kehutanan yang lebih lestari, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi Kementerian Kehutanan

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita ke-2 yakni; “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” menjadi landasan dalam perumusan pernyataan Misi Kementerian Kehutanan. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Kehutanan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi Kementerian Kehutanan yaitu:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Tujuan Kementerian Kehutanan

Tujuan Kementerian Kehutanan merupakan wujud konkret dari harapan yang terkandung dalam Visi dan Misi. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran strategis yang terukur dan berorientasi pada dampak. Adapun tujuan Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; serta
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.

Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan, Kementerian Kehutanan menetapkan empatsasaran strategis yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-2029. Keempat sasaran strategis tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi ekologi, ekonomi, sosial, serta tata kelola kehutanan yang adaptif. Uraian sasaran strategis Kementerian Kehutanan yang menggambarkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja penurunan laju deforestasi serta Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies (*Red List Index*);
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan indikator kinerja Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatnya produk barang dan jasa dari hutan, dengan indikator kinerja nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, nilai ekspor produk kehutanan, produksi hasil hutan bukan kayu, dan nilai PNBP fungsional kehutanan; serta
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian Kehutanan menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

2.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal KSDAE

Mandat pengelolaan keanekaragaman hayati oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema “Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, serta visi, misi, dan strategi pembangunan kehutanan pada periode yang sama. Tema tersebut juga merupakan pengejawantahan dari tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati, baik yang termuat dalam *World Conservation Strategy*, *Convention on Biological Diversity*, maupun amanat dalam Undang-Undang Konservasi Hayati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024).



Gambar 11. Tema Direktorat Jenderal KSDAE 2025 - 2029

Walaupun tema tersebut terkesan seperti sebuah paradoks, namun kontradiksi pada upaya mencegah kepunahan dan mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat disangkal dengan visualisasi yang jelas pada penjenjangan strategi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE. Memang telah menjadi aksioma bahwa percepatan kepunahan keanekaragaman hayati terutama disebabkan oleh upaya pemanfaatan yang berlebihan, namun jika upaya pemanfaatan dilakukan dengan tata kelola yang baik maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang sebaliknya (*boomerang effect*).

Pemanfaatan keanekaragaman hayati pada dasarnya dapat berfungsi sebagai titik unkit pelestarian keanekaragaman hayati, karena menurut Pudyatmoko (2024) keberhasilan konservasi keanekaragaman hayati sangat bergantung pada kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat. Apabila manfaat dari potensi keanekaragaman hayati dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maka saat itu pula mereka akan ikut menjaga sumber-sumber perekonomian dan kesejahteraan tersebut. Sinclair et al (2006) juga menyampaikan bahwa salah satu dari empat upaya pengelolaan populasi satwa liar adalah pemanenan yang perlu dilakukan agar populasi berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Kehutanan dan sejalan dengan tema tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan visi ***“Keseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial”***. Visi tersebut menggambarkan komitmen untuk mencapai tujuan utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai panduan umum yang memberikan arah bagi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal KSDAE beserta jajarannya.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE tersebut mencerminkan mandat pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati. Visi tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana *Outcome Document* yang dihasilkan dalam konferensi Rio+20 pada tahun 2012 yang berjudul ***“The Future We Want”***, atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals*.

Penjelmaan visual dan konseptual dari visi di atas dapat dilihat pada peta strategi pembangunan Direktorat Jenderal KSDAE. Peta strategi tersebut merupakan visualisasi dari target-target utama yang ingin dicapai, termasuk dalam hal perbaikan tata kelola (*internal process serta learning and growth*). Peta strategi Direktorat Jenderal KSDAE merupakan pedoman utama bagi seluruh unsur dan unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, agar dapat menjamin keterpaduan arah, keselarasan strategi, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran program.

Misi Direktorat Jenderal KSDAE

Serangkaian tindakan atau langkah konkret yang dirancang oleh Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai visi di atas diuraikan menjadi empat misi. Misi tersebut memberikan arah dan fokus pada kegiatan jangka menengah seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE. Bertalian dengan misi Kementerian Kehutanan, maka Misi Direktorat Jenderal KSDAE dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati;
2. Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati;
3. Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi keanekaragaman hayati yang baik.



Gambar 12. Misi Direktorat Jenderal KSDAE

2.3. Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029

Penjenjangan kinerja Kementerian Kehutanan yang komprehensif telah divisualisasikan secara gamblang dan lengkap melalui pohon kinerja pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029. Pohon kinerja ini menggambarkan hubungan antara visi dan misi Kementerian Kehutanan dengan tujuan, sasaran strategis, sasaran program hingga ke level kegiatan beserta indikatornya. Dokumen tersebut bahkan juga telah menggambarkan keterkaitan upaya pembangunan kehutanan dengan visi pembangunan nasional serta agenda prioritas Presiden Republik Indonesia. Pembangunan sektor kehutanan pada periode 2025–2029 diarahkan untuk berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kehutanan menetapkan arah kebijakan yang dituangkan melalui tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang terukur.

Tujuan pembangunan kehutanan dirancang untuk mencerminkan peran strategis sektor kehutanan dalam menjaga fungsi lingkungan hidup, memperkuat ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, serta memperluas akses dan manfaat hutan bagi masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran strategis sebagai gambaran kondisi yang ingin dicapai. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang bersifat spesifik,

terukur, dan relevan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025– 2029.

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029

Tujuan 1:							
Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi	Reduksi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan	15	15	16	16	17	Persen
Sasaran Strategis 1:	Penurunan laju deforestasi	0,111	0,106	0,102	0,098	0,094	Juta Ha
Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancam Spesies	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	Poin
Tujuan 2:							
Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan	Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya	25	30	40	60	75	Persen
Sasaran Strategis 2:							
Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan	2.810	3.171	3.532	3.893	4.254	Miliar Rupiah
Tujuan 3:							
Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto sub sektor kehutanan	1,5	1,8	2,4	3	3,4	Persen
Sasaran Strategis 3:							Triliun
Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	Nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan	134,74	136,19	139,64	142,09	146,54	Rupiah
	Nilai ekspor produk kehutanan	15,4	15,82	16,23	16,64	17,05	Miliar USD
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)	450	500	550	600	650	Ribu Ton
	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	7,72	8,29	8,86	9,42	9,99	Triliun Rupiah
Tujuan 4:							
Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani	Nilai Reformasi Birokrasi	80,31	81,65	82,67	83,65	83,7	Poin
Sasaran Strategis 4:							
Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	Poin

Pemetaan peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan tersebut di atas, pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029 dipresentasikan secara visual dalam pohon kinerja berbentuk diagram tulang ikan. Pada delapan

indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian enam indikator sasaran strategis, walaupun secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap pencapaian seluruh indikator sasaran strategis.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis, Kementerian Kehutanan melaksanakan tiga program dengan masing-masing sasaran program. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program, pada setiap sasaran program ditetapkan indikator kinerja program yang diampu oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I. Pada tabel berikut diuraikan sasaran program dan indikator kinerja program yang diampu oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

Tabel 4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program 1: Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	5	15	25	35	50
	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i>	Spesies (kumulatif)	3	8	15	30	50
Sasaran Program 2: Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Miliar Rupiah	200	210	220	230	240
Sasaran Program 3: Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i>	Triliun Rupiah	7,75	7,80	8,00	8,20	8,40
	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Miliar Rupiah	235	241,5	249	257,5	267

Kontribusi Balai Taman Nasional Baluran dalam upaya pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 5. Kontribusi/Aksi Nyata Balai TNB terhadap Sasaran Program dan IKP Ditjen KSDAE

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kontribusi/ Aksi Nyata TNB
Sasaran Program 1: Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>	Melaksanakan penelitian dan monitoring intensif terhadap spesies prioritas di TN Baluran, khususnya Macan tutul (<i>Panthera pardus</i>), yang saat ini berstatus <i>terancam punah (Endangered)</i> . Data hasil penelitian tersebut disampaikan ke tim nasional untuk <i>asesmen</i> IUCN, sehingga secara langsung memenuhi target jumlah spesies yang diasesmen.

	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i>	Melakukan upaya konservasi ex-situ dan in-situ terpadu (program pemulihan ekosistem, Suaka Satwa Banteng, Reintroduksi babi kutil) Keberhasilan upaya ini, yang ditandai dengan keberhasilan peningkatan jumlah spesies Banteng dan terdatanya kembali Babi Kutil yang sebelumnya dianggap punah lokal.
		Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi (aplikasi jejak Banteng) dalam penerapan SMART PATROL dan melibatkan masyarakat dalam patroli terpadu untuk mencegah tindak pidana kehutanan (perambahan, kebakaran, perburuan liar)
Sasaran Program 2: Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Memfasilitasi kelompok masyarakat (KTH, Kelompok Ternak, Kelompok Arang, dan kelompok masyarakat lainnya) dalam peningkatan kemampuan kelompok untuk mengembangkan skala usaha kelompok.
		Peningkatan layanan dan fasilitas berupa penataan areal wisata Batangan – Bekol – Bama dan Watunumpuk – Labuhan merak untuk diversifikasi wisata serta menambah length of stay sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar BTN Baluran.
Sasaran Program 3: Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i>	Memfasilitasi kegiatan penelitian dan pendataan potensi <i>bioprospecting</i> (misalnya, tumbuhan obat tradisional)
	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Meningkatkan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari e-ticketing dan retribusi jasa lainnya melalui pengelolaan yang profesional. Peningkatan kualitas layanan wisata berbasis satwa liar dan pengembangan wisata minat khusus berupa camping ground, campervan, serta pengamatan satwa liar

2.4. Identifikasi Risiko Sasaran Program

Risiko yang mungkin terjadi untuk mencapai sasaran program dan indikator kinerja program perlu diidentifikasi dengan cermat agar dapat diupayakan langkah-langkah mitigasinya. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi agar apa yang direncanakan dapat terwujud dengan capaian yang memadai. Berikut diuraikan pemetaan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam upaya pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE beserta upaya mitigasinya.

Sasaran Program 1

Risiko yang mungkin terjadi dan upaya mitigasi dalam mencapai sasaran “meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati” adalah sebagai berikut:

1. **Reviu dan publikasi hasil asesmen keterancaman spesies.** Proses reviu dan publikasi hasil asesmen status keterancaman spesies secara nasional terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama, dan hal ini tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah Indonesia. Hasil evaluasi

status keterancaman spesies secara nasional hanya akan terpublikasi pada sistem database IUCN Red List (diperhitungkan dalam formula Red List Index) apabila telah mendapat revidi dan persetujuan dari tim pakar yang disediakan oleh IUCN Species Survival Commission (IUCN SSC). Proses yang membutuhkan waktu lama ini dapat saja menghambat pencapaian target RLI Indonesia sebesar 0,76 pada tahun 2029. Sebagai contoh, 11 spesies dari marga *Macaca* yang telah diajukan hasil evaluasinya sejak tahun 2024, hingga saat ini belum diterbitkan oleh IUCN. Saat ini, Indonesia telah mengajukan hasil asesmen terhadap 876 spesies (primata, burung, amfibi, anggrek dan babi endemik Sulawesi), dan belum mendapat persetujuan untuk publikasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain:

- a. sebanyak mungkin melakukan asesmen terhadap status keterancaman spesies jika sumber daya tersedia, terutama terhadap 1.515 spesies satwa liar di Indonesia yang saat ini masih berstatus Data Deficient (DD);
 - b. asesmen status keterancaman spesies akan lebih baik jika dilakukan oleh anggota IUCN SSC yang merupakan anggota Indonesian Species Survival Group (id-SSG);
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen keterancaman spesies kepada para pakar spesies yang bekerja pada BRIN beserta koleganya yang merupakan anggota IUCN SSC; serta
 - d. Pemerintah Indonesia secara intensif melakukan korespondensi dengan IUCN SSC untuk percepatan revidi dan publikasi.
2. **Kebakaran hutan dan lahan saat El Nino.** Kebakaran hutan yang disebabkan dan/atau diperparah oleh daya-daya alam seperti El Nino dapat terjadi secara massif pada tahun 2027. Fenomena 5 tahunan ini selalu menimbulkan kebakaran pada areal yang cukup luas di Indonesia, terutama pada tahun 1997. Kebakaran hutan dan lahan yang massif akan menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun, dan berdampak pada banyak hal, termasuk terhadap kondisi perekonomian dan kesejahteraan sosial (terutama kesehatan). Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain:
- a. peningkatan kapasitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada kondisi El Nino (SDM, sarana dan prasarana, serta pembiayaan);
 - b. penyebarluasan informasi dan penyadartahuan upaya mitigasi bahaya kebakaran hutan dan lahan secara massif kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi;
 - c. aktif mengkoordinasikan kondisi kebakaran hutan dan lahan kepada pihak-pihak terkait; serta
 - d. melakukan upaya modifikasi cuaca apabila sangat diperlukan, dengan berkoordinasi kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, BMKG, serta pihak lain yang memiliki kapasitas sumber daya.
3. **Efektivitas sistem perlindungan kawasan konservasi.** Sistem perlindungan kawasan konservasi, terutama upaya preventif (patroli dan penjagaan kawasan) terkadang dapat saja menjadi tidak efektif dalam menekan tingkat gangguan tertentu pada kawasan konservasi. Dalam banyak kasus, hal ini terkadang dapat terjadi di banyak kawasan konservasi. Sistem perlindungan kawasan konservasi yang tidak efektif dapat menyebabkan percepatan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan

kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain:

- a. menerapkan upaya preventif dalam perlindungan kawasan secara tersistem, berbasis spasial, dan informasinya dapat dipantau serta dianalisis secara real time. Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) adalah salah satu perangkat lunak yang efektif dalam mendukung upaya ini. Analisis dari data yang tersimpan di dalam sistem dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Saat ini, 53 dari 74 UPT Direktorat Jenderal KSDAE telah menggunakan SMART dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasinya di lapangan. Sampai dengan tahun 2029, akan diupayakan agar seluruh UPT dapat menggunakan SMART;
 - b. menerapkan Integrated Prevention Model (IPM) dalam upaya menekan tingkat gangguan kawasan konservasi di seluruh UPT Direktorat Jenderal KSDAE. IPM merupakan sebuah sistem yang dikembangkan oleh kepolisian di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengintervensi akar penyebab dari masalah kejahatan tersebut. Di Indonesia, IPM telah diadopsi dan terbukti efektif dalam menekan tingkat gangguan kawasan konservasi di TN Way Kambas dan TN Gunung Leuser; serta;
 - c. peningkatan kapasitas perlindungan kawasan konservasi (SDM, sarana dan prasarana, serta pembiayaan);
4. **Bencana geologi yang berdampak pada degradasi ekosistem.** Bencana-bencana geologi seperti erupsi gunung berapi dan tanah longsor berdampak secara langsung dan signifikan terhadap degradasi ekosistem, sehingga akan menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain:
- a. menerapkan standar-standar evakuasi dan penyelamatan satwa liar saat kejadian bencana alam; serta
 - b. melakukan upaya pemulihan ekosistem secara massif pada wilayah-wilayah terdampak.
5. **Percepatan peningkatan populasi manusia.** Percepatan peningkatan populasi manusia di wilayah-wilayah sekitar kawasan konservasi serta peningkatan standar hidup manusia akan berkorelasi terhadap peningkatan kebutuhan sumber-sumber perekonomian. Apabila tidak ditunjang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai, maka cara instan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adalah dengan upaya ekstraktif terhadap sumber daya yang tersedia di dalam kawasan konservasi. Kondisi ini terkadang sulit untuk dapat dikendalikan, dan terkadang pula tidak dapat diimbangi oleh kemampuan suksesi alami dari keanekaragaman hayati. Sebuah aksioma: ekstraksi potensi keanekaragaman hayati secara berlebihan dan tidak terkontrol, secara pasti akan berdampak pada degradasi ekosistem, sehingga akan menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain:
- a. mengoptimalkan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi;
 - b. mengoptimalkan pembinaan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; serta

- c. mengintervensi tingkat pendidikan masyarakat di sekitar kawasan, salah satunya dengan mendorong agar anak-anak yang hidup di sekitar kawasan dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMK Kehutanan) dengan persyaratan yang dimudahkan.

6. **Tantangan dan hambatan dalam pencadangan areal preservasi.** Konsep dan kerangka kerja areal preservasi, sebagaimana yang saat ini masih sedang dalam proses penyusunan (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Areal Preservasi), belum dipahami dengan baik oleh para pihak. Sebagian besar masyarakat, pemangku lahan/kawasan, pelaku usaha, bahkan pejabat pemerintah, masih beranggapan bahwa areal preservasi adalah kawasan konservasi. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa pencadangan areal preservasi menyebabkan lahan budi daya yang dikelola akan beralih fungsi menjadi kawasan konservasi, bahkan akan berubah statusnya menjadi state property. Hal tersebut berpotensi menjadi factor penghambat pencapaian target pencadangan areal preservasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain:

- a. mempercepat penyelesaian RPP Areal Preservasi dengan proses konsultasi publik yang massif;
- b. melakukan diseminasi informasi terkait areal preservasi pada berbagai wahana yang dapat menjangkau banyak kalangan secara luas dengan biaya yang rendah; serta
- c. melakukan uji coba pada beberapa pilot project pencadangan areal preservasi. Uji coba pada masa awal ini sebaiknya dilakukan pada wilayah-wilayah yang dulunya merupakan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan efektif berfungsi sebagaimana kawasan ekosistem esensial.

Sasaran Program 2

Risiko yang mungkin terjadi dan upaya mitigasi dalam mencapai sasaran “meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga” adalah sebagai berikut:

1. **Pengungkapan nilai transaksi ekonomi.** Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan usaha ekonominya, terkadang akan terjadi keengganan beberapa anggota masyarakat untuk mengungkapkan nilai transaksi ekonomi hasil dari pembinaan usaha ekonominya secara terbuka. Kondisi ini akan berpengaruh pada bias hasil perhitungan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain:
 - a. melakukan perhitungan nilai transaksi ekonomi melalui survei yang terbimbing dan in-depth interview. Metode survei sosial dengan wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif yang efektif dalam meminimalkan bias perhitungan, karena metode ini menekankan fleksibilitas untuk menggali informasi yang tidak terduga, membangun suasana nyaman, dan menggunakan teknik probing untuk mendapatkan data yang lengkap dan bernuansa; serta
 - b. perhitungan nilai transaksi ekonomi dilakukan dengan metode alternatif tertentu yang melibatkan asumsi- asumsi harga atas kuantitas produk yang dihasilkan atau dimanfaatkan. Survei tidak secara langsung dilakukan terhadap nilai transaksi ekonomi melainkan berbasis pada kuantitas barang dengan asumsi harga pasaran.

2. **Pemahaman atas nilai transaksi ekonomi.** Nilai transaksi ekonomi, mungkin adalah hal yang baru bagi para pelaku kegiatan pemberdayaan masyarakat di lapangan. Pemahaman dan pemaknaan terkait cara perhitungan nilai transaksi ini mungkin saja masih sangat beragam. Dalam pemberian akses pemanfaatan kawasan konservasi, potensi kawasan yang dimanfaatkan terkadang dilakukan secara subsisten, tidak untuk diperdagangkan secara komersial. Namun demikian, pemanfaatan secara subsisten tersebut juga harus tetap disubstitusi menjadi nilai transaksi ekonomi. Terkadang pula, potensi yang dimanfaatkan bukan merupakan produk akhir yang dipasarkan, sehingga sulit untuk menghitung nilainya secara akurat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu memberikan pedoman dan arahan yang jelas bagi para pelaku kegiatan di lapangan, terutama bagi para penyuluh kehutanan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Direktorat Konservasi Kawasan perlu menerbitkan pedoman pelaksanaan perhitungan nilai transaksi ekonomi dari pemberian akses pemanfaatan kawasan, maupun dari kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi.

Sasaran Program 3

Risiko yang mungkin terjadi dan upaya mitigasi dalam mencapai sasaran “meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem” adalah sebagai berikut:

1. **Kebocoran penerimaan negara.** Kebocoran penerimaan negara dari upaya pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sangat mungkin terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain:
 - a. dari waktu ke waktu, perlu terus dilakukan perbaikan sistem tata kelola pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, dengan menyesuaikan dengan kondisi serta kemajuan teknologi;
 - b. menerapkan sistem cashless payment;
 - c. dalam pengelolaan wisata alam, secara perlahan menerapkan sistem tiket pengunjung secara daring (e-ticketing), sehingga tidak terjadi pemalsuan tiket pada pintu- pintu masuk obyek wisata alam; serta
 - d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian dengan memanfaatkan teknologi digital yang tersedia.
2. **Potential loss.** Dalam pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, besar kemungkinan dapat terjadi *potential loss* penerimaan negara. Hal tersebut dapat disebabkan oleh sistem tata kelola yang kurang memadai. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain:
 - a. melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kehutanan secara berkala dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama (1-2 tahun) mengingat penurunan nilai mata uang akibat inflasi; serta
 - b. melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkala dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama (1-2 tahun). Penyesuaian patokan harga tersebut harus didasarkan atas perhitungan nilai intrinsik keanekaragaman hayati.

Risiko utama yang dihadapi Balai TN Baluran terbagi berdasarkan kontribusinya pada tiga Sasaran Program Ditjen KSDAE:

Tabel 6. Identifikasi dan Mitigasi Risiko Balai TN Baluran berdasarkan kontribusinya pada tiga Sasaran Program Ditjen KSDAE

Hasil Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko
Karhutla yang disebabkan atau diperparah oleh daya alam seperti El Nino	Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi (aplikasi jejak Banteng, sipongi,) dalam penerapan SMART PATROL dan melibatkan masyarakat dalam patroli terpadu untuk mencegah tindak pidana kehutanan (perambahan, kebakaran, perburuan liar)
Sistem perlindungan kawasan konservasi (patroli dan penjagaan) berpotensi tidak efektif dalam menekan tingkat gangguan tertentu	Menerapkan upaya preventif berbasis spasial dengan menggunakan aplikasi jejak banteng / SMART (<i>Spatial Monitoring and Reporting Tool</i>) dalam pelaksanaan patroli pengamanan lapangan berbasis grid
Peningkatan populasi masyarakat serta standar kelayakan hidup di sekitar kawasan Balai Taman Nasional Baluran dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi, yang berpotensi mendorong upaya ekstraktif yang berlebihan terhadap sumber daya di dalam kawasan	Mengoptimalkan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, pembinaan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Anjagsana dalam rangka penyadartahuan kawasan konservasi/pendidikan konservasi
Ketidak terbukaannya masyarakat (misalnya usaha tungku arang, ternak kambing, pemungut hbbk, usaha jasa makanan dan minuman) untuk mengungkapkan nilai transaksi ekonomi mereka secara terbuka dapat menyebabkan bias hasil perhitungan indikator kinerja	Melakukan rekapitulasi nilai transaksi ekonomi melalui pendampingan meminimalkan bias, atau perhitungan berdasarkan kuantitas barang dengan asumsi harga pasaran
Belum ada panduan baku dalam perhitungan Nilai Transaksi Ekonomi di tingkat tapak, sehingga terjadi perbedaan pemahaman dan pemaknaan terkait cara perhitungan nilai transaksi ekonomi di tingkat pelaksana lapangan.	Direktorat Konservasi Kawasan perlu menerbitkan pedoman dan arahan yang jelas bagi para pelaku kegiatan di lapangan, termasuk penyuluh kehutanan di lingkungan Ditjen KSDAE
Kebocoran penerimaan negara dari pemanfaatan jasa lingkungan, seperti dari tiket masuk, kegiatan wisata camping, kegiatan wisata minat khusus karena berbagai faktor	Balai TN Baluran telah memitigasi dengan penerapan sistem cashless payment, perbaikan tata kelola wisata (perbaikan fasilitas tiket) serta peningkatan pengawasan dan pengendalian menggunakan teknologi digital menggunakan aplikasi sobat banteng.

2.5. Tonggak Pencapaian (*Milestone*) Pembangunan

Direktorat Jenderal KSDAE merupakan bagian dari Kementerian Kehutanan. Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE secara sekuensial serta berjenjang mengikuti target capaian Kementerian Kehutanan. Pembangunan kehutanan 2025-2029 diarahkan pada pengembangan bioekonomi berbasis hutan dan dekarbonisasi dari sektor hutan, dengan rancangan pemenuhan tonggak pencapaian (*milestone*) untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- Tahun 2025:** Peningkatan produksi dan hilirisasi hasil hutan untuk pemerataan pembangunan ekonomi wilayah dengan indikator keberhasilan yaitu konsolidasi para pihak dan implementasi kelembagaan Kementerian Kehutanan semakin kuat untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi;
- Tahun 2026:** Aktualisasi hutan untuk pangan, energi dan sumber daya air serta hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah dengan indikator keberhasilan laju deforestasi semakin dapat dikonsolidasikan, akses kelola masyarakat berangsur merata, hilirisasi mulai digalakkan, dan upaya digitalisasi mulai terlihat melalui *cashless payment*;
- Tahun 2027:** Pengembangan bioprospeksi dan intensifikasi agroforestri untuk memperkuat

konsolidasi kemajuan dan kemandirian wilayah dengan indikator keberhasilan frekuensi kebakaran hutan dan gangguan keamanan hutan semakin berkurang untuk mendukung dan menjaga habitat spesies terancam punah, contoh bioprospeksi dikembangkan di beberapa tempat, hasil panen agroforestri sudah mulai terlihat mendukung ketahanan pangan, serta *one map policy* sudah mulai dikonsolidasikan;

4. **Tahun 2028:** Ketahanan pangan dan energi dari pengelolaan hutan lestari untuk pembangunan bioekonomi dan reduksi emisi dengan indikator keberhasilan frekuensi kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor di sekitar hutan semakin berkurang, intensifikasi agroforestri sudah mulai mendorong kemajuan dan kemandirian desa, serta derajat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Kehutanan semakin meningkat;
5. **Tahun 2029:** Bioekonomi hutan untuk transformasi pertumbuhan ekonomi dengan indikator keberhasilan tingkat keterancaman spesies semakin menurun, ketahanan pangan sudah memiliki bukti dalam upaya peningkatan kemajuan dan kemandirian desa, serta bioekonomi sudah mulai terlihat mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

Sebagai entitas Tingkat tapak, Balai Taman Nasional Baluran memiliki peran dalam mewujudkan Tonggak Pencapaian (*Milestone*) Pembangunan Kehutanan 2025-2029 yang telah ditentukan oleh Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal KSDAE. Kontribusi nyata Balai Taman Nasional Baluran dirancang untuk memastikan integrasi antara fungsi ekologi, ekonomi, sosial, dan tata kelola kehutanan yang adaptif dan dinamis di Balai Taman Nasional Baluran. Kontribusi yang dapat dilakukan oleh Balai TN Baluran dalam mendukung capaian Pembangunan di Tingkat nasional diantaranya adalah :

Tabel 7. Tabel Milestone Pembangunan Balai TN Baluran berdasarkan kontribusinya pada Milestone Pembangunan Ditjen KSDAE

Tahun	Milestone
2025	Pada tahap awal yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan peningkatan perbaikan tata kelola wisata, Balai Taman Nasional Baluran mendukung dengan meningkatkan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan wisata dengan para pihak (Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta) untuk memperkuat implementasi kelembagaan. Balai Taman Nasional Baluran juga langsung berkontribusi pada dorongan peningkatan produksi dan hilirisasi hasil hutan melalui sektor jasa, yaitu dengan memfasilitasi kelompok masyarakat untuk menyediakan jasa wisata, peningkatan PNBP dari objek wisata (tiket masuk, pembayaran pungutan jasa wisata, sewa BMN, dan retribusi jasa lainnya) serta peningkatan usaha ekonomi produktif dari produk HHBK dan peternakan.
2026	Upaya yang dilakukan pada tahun 2026 dengan melakukan konsolidasi laju deforestasi dengan melakukan kegiatan patroli serta implementasi digitalisasi melalui <i>cashless payment</i> PNBP di kawasan TN Baluran. Upaya nyata Taman Nasional Baluran mendukung konsolidasi laju deforestasi dengan adanya penggunaan teknologi untuk pemantauan lokasi dan patroli pengamanan kawasan dalam penerapan SMART PATROL menggunakan aplikasi jejak banteng. Sementara itu, dalam rangka digitalisasi layanan wisata, BTN Baluran secara konkret menggunakan aplikasi untuk pemantauan PNBP dan penerapan <i>cashless payment</i> untuk sebagai bagian dari transparansi anggaran.
2027	Milestone pada tahun 2027 berfokus pada pengurangan frekuensi gangguan keamanan hutan, pengembangan digitalisasi wisata melalui booking online, penataan areal publik, serta identifikasi pengembangan bioprospeksi (tumbuhan obat tradisional) yang dapat dikembangkan sebagai produk turunan dimasa yang akan datang, yang sangat relevan dengan mandat KSDAE.

2028	Fokus pada tahun ini adalah dorongan kemajuan dan kemandirian masyarakat disekitar kawasan Taman Nasional Baluran . adapun langkah-langkah yang rencana akan dilakukan diantaranya adalah : 1. Mendorong Kemajuan dan Kemandirian Desa: Memfasilitasi kelompok masyarakat (Pokdarwis, Porter, Pemandu) untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan secara partisipatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan ekonomi produktif ini secara langsung akan menaikkan nilai transaksi ekonomi total masyarakat. 2. Peningkatan Kepuasan Masyarakat: Aksi nyata yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, adaptif, dan transparan didukung dengan peningkatan layanan wisata berbasis satwa liar, manjamen destinasi wisata yang meningkatkan nilai jual jasa lingkungan Taman Nasional Baluran
2029	Tahun 2029 menjadi ujung milestone renstra 2025-2029 Kementerian Kehutanan. Sebagaimana milestone yang dirancang pada tahun ini pencapaian ditandai dengan menurunnya tingkat keterancaman spesies dan dimulainya transformasi bioekonomi. Langkah nyata kontribusi BTN Baluran diukur dengan mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah (Bioekonomi Hutan): Dengan mengembangkan pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam yang berkelanjutan dan berkontribusi dalam peningkatan database bioprospeksi nasional

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Amanat RPJPN ini selanjutnya menjadi dasar perumusan visi pembangunan nasional tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang pemenuhannya dicapai melalui delapan misi, atau lebih dikenal dengan Asta Cita. Asta Cita dimaksud yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pembangunan nasional 2025-2029, Asta Cita dikenal sebagai Prioritas Nasional (PN), yang merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025- 2029. Adapun dukungan utama Kementerian Kehutanan terhadap Prioritas Nasional Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 tercermin secara langsung pada Prioritas Nasional 2. Namun demikian, Kementerian Kehutanan juga terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional 4, 5, 6, dan 8. Dalam pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang masing-masing memiliki sasaran terukur.

Sasaran pembangunan nasional 2025-2029 adalah: (1) meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan Gross National Income (GNI) per kapita berada pada angka US\$ 8.000; (2) kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan adalah peringkat *Global Power Index* pada angka 29; (3) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain tingkat kemiskinan turun menjadi 4,5-5 persen, dan rasio gini turun menjadi 0,372-0,375; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan adalah indeks modal manusia meningkat menjadi 0,59; (5) intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dengan ukuran keberhasilan yang

dirumuskan yaitu penurunan intensitas emisi GRK sebesar 45,17% dan indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 77,20.

Pembangunan nasional 2025-2029 menekankan strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Strategi menurunkan tingkat kemiskinan ditempuh setidaknya dengan: (1) memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bertujuan untuk memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat; (2) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan; (3) meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja; dan (4) memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.

Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan dijalankan dan bertumpu pada: (1) pemenuhan layanan dasar, yang mencakup pelayanan kesehatan, jaminan gizi, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, perlindungan sosial, dan perlindungan dari kekerasan; (2) pembangunan modal manusia yang mencakup pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, pelatihan vokasi dan kewirausahaan, literasi dan kecakapan hidup, dan pembudayaan prestasi olah raga; dan (3) pembangunan modal sosial budaya, yang mencakup agama, kebudayaan, pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, dan keluarga dan pengasuhan. Ketiga titik tumpu ini selanjutnya ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang.

Strategi ketiga adalah mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Strategi ini akan ditempuh dengan upaya: (1) peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan; (2) industrialisasi (hilirisasi), padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan; (3) pariwisata dan ekonomi kreatif; (4) ekonomi biru dan ekonomi hijau; (5) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; (6) transformasi digital; (7) investasi berorientasi ekspor dan investasi non APBN; (8) konservasi sumber daya air; serta (9) produktivitas belanja negara. Pengungkit utama dari strategi mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan adalah deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter pro-growth. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga merupakan kontribusi dari pertumbuhan ekonomi wilayah, dan dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci dan faktor pendorong.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan

Pembangunan kehutanan 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mengisi prioritas nasional kedua “memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”. Sasaran utama pada prioritas nasional kedua yang didukung oleh Kementerian Kehutanan adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan,

energi, air, dan terwujudnya transformasi ekonomi hijau. Selain itu, Kementerian Kehutanan mendukung prioritas nasional keempat "memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas", dengan sasaran utama yang didukung adalah terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata. Prioritas Nasional keenam "membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan" dengan sasaran utama yang didukung adalah mewujudkan pembangunan kemandirian pedesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan juga mendukung sasaran utama pada prioritas nasional kedelapan "Memperkuat penyelarasan kehidupan alam yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur" dengan sasaran utama yang didukung adalah resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Isu utama dari sasaran prioritas nasional kedua adalah kehilangan keanekaragaman hayati serta pengelolaan kawasan hutan yang belum mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan. Intervensi untuk mengatasi isu yang ada dan memenuhi kinerja pembangunan kehutanan diarahkan pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Intervensi untuk pelestarian keanekaragaman hayati antara lain akan diwujudkan melalui: (1) perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (2) pengurangan ancaman kepunahan spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (3) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (4) pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan mendukung bioekonomi; serta (5) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik.

Pengelolaan hutan lestari mengarahkan intervensi untuk pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi. Dengan demikian transformasi kebijakan pengelolaan hutan lestari meliputi: (1) peningkatan produktivitas hutan; (2) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri; (3) penguatan pengelolaan hutan lestari; (4) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari; (5) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan; serta (5) perlindungan dan pengamanan hutan.

Kebutuhan intervensi tersebut diterjemahkan lebih lanjut menjadi arah kebijakan. Kementerian Kehutanan merumuskan kebijakan pembangunan tahun 2025- 2029, yaitu: (1) pemantapan kawasan hutan; (2) konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (3) peningkatan daya dukung daerah aliran sungai; (4) pengelolaan hutan lestari dan peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan industrialisasi hasil hutan; (5) peningkatan akses kelola hutan yang berkeadilan; (6) perlindungan dan pengamanan hutan; (7) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan; serta (8) peningkatan tata kelola dan pengendalian internal.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Kehutanan juga berfokus pada kebijakan dan strategi dalam pengurusan kawasan hutan, yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan. Adapun kebijakan dan strategi Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. **Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air.** Termasuk di dalamnya perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi lahan kritis serta pengendalian deforestasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menurunkan emisi karbon dan menjawab krisis iklim

dengan strategi yang akan ditempuh antara lain: (a) melindungi wilayah hulu DAS dan pesisir di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi; (b) menjaga keanekaragaman hayati utamanya kekayaan spesies kebanggaan Indonesia; (c) memulihkan hutan berstatus kritis melalui upaya rehabilitasi hutan, termasuk di dalamnya menurunkan erosi dan aliran permukaan melalui bangunan sipil teknis; serta (d) mengantisipasi dan menurunkan kejadian kebakaran hutan di provinsi rawan kebakaran hutan.

2. **Penguasaan hutan yang berkeadilan.** Kementerian membuka ruang bagi masyarakat adat dan lokal yang selama ini tersisih dengan memberikan akses legal dan perlindungan hukum atas hutan yang secara historis jadi bagian dari identitas dan penghidupan mereka. Strategi yang akan dijalankan untuk mendukung kebijakan ini adalah: (a) penyelesaian kasus sawit ilegal dan kawasan terbangun lainnya di kawasan hutan; (b) penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan, utamanya terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tidak aktif di lapangan; serta (c) audit dan pemberlakuan sanksi bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) utamanya dalam pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. **Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air.** Melalui pendekatan agroforestri, kawasan hutan dikelola untuk menghasilkan pangan secara lestari, seperti tanaman aren, dan HHBK lainnya bersama pepohonan hutan, menjaga ekosistem sekaligus menyediakan pangan dan ekonomi dengan strategi: (a) penyediaan lahan untuk food estate (lumbung pangan) baik dalam skala besar, menengah maupun kecil; (b) perhutanan berbasis masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan keragaman pangan lokal; serta (c) peningkatan multi usaha kehutanan untuk mendukung pangan dan hilirisasi aren.
4. **One Map Policy.** Seluruh aktivitas pemetaan kehutanan akan disatukan secara nasional dengan strategi melakukan integrasi informasi geospasial tematik dan pemantauan hutan nasional melalui sistem informasi "jaga rimba". Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dan konflik lahan sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data yang akurat.
5. **Digitalisasi layanan kehutanan.** Digitalisasi layanan merupakan salah satu bentuk modernisasi tata kelola hutan, dengan strategi yang dilakukan: (a) digitalisasi seluruh layanan Kementerian Kehutanan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat tapak; (b) penguatan infrastruktur pusat data dan pembangunan pusat data yang terstandardisasi; serta (c) penerapan cashless payment dan e-ticketing pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa. Melalui sistem digital, masyarakat diharapkan dapat mengakses data dan perizinan dengan lebih mudah dan transparan. Proses yang dulunya panjang dan rawan penyimpangan diharapkan dapat dipangkas menjadi efisien dan akuntabel.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mengintegrasikan pengarusutamaan pembangunan dalam kebijakan dan strategi sektor kehutanan, Kementerian Kehutanan menerapkan lima pendekatan utama dalam pembangunan, yaitu gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sektor kehutanan diharapkan dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk menggambarkan dan menginternalisasi arahan pembangunan nasional dan kebijakan Kementerian Kehutanan, terdapat empat transformasi utama pembangunan kehutanan 2025- 2029, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi kehutanan; (2) pengelolaan keanekaragaman hayati; (3) hutan cadangan pangan, energi dan air; serta (4) hilirisasi kayu log, getah pinus dan bioethanol.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE

Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 dirancang secara presisi untuk menempatkan dan mengarahkan peran strategis sektor kehutanan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional serta tujuan pembangunan berkelanjutan global. Target pembangunan nasional 2025-2029 adalah sebagaimana diuraikan dalam Asta Cita dan telah dibahas sebelumnya. *The 17 Goals of Sustainable Development (SDGs)* dapat dipahami secara cepat melalui dua kerangka utamanya, yaitu model 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership*) yang digunakan secara global, serta empat pilar yang diadopsi oleh Indonesia. Ke-17 tujuan *SDGs* dikelompokkan ke dalam empat pilar untuk mempermudah pelaksanaannya di tingkat nasional, yaitu: (1) pilar pembangunan sosial; (2) pilar pembangunan ekonomi; (3) pilar pembangunan lingkungan; serta (4) pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Keempat pilar tersebut koheren dan seiring dengan 4 pernyataan misi, 4 tujuan, 4 sasaran strategis, dan 8 indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam periode 2025-2029.

Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mengupayakan pencapaian seluruh pilar tujuan pembangunan berkelanjutan. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan secara berjenjang dan bertalian. Namun demikian, Direktorat Jenderal KSDAE hanya akan berperan secara langsung pada dua prioritas nasional, walaupun secara tidak langsung akan berperan dalam pencapaian lima prioritas nasional sebagaimana diuraikan dalam rumusan Asta Cita. Secara langsung, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian empat dari delapan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8. Intervensi Direktorat Jenderal KSDAE dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan

No	Indikator Kinerja Kementerian Kehutanan	Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		
1.	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies sebesar 0,76 poin.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies.
2.	Nilai ekspor produk kehutanan sebesar 17,05 Milliar USD.	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i> sebesar Rp. 8,4 Triliun.
3.	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan sebesar Rp. 9,99 Triliun.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan sebesar Rp. 267 Miliar
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.		
4.	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan Rp. 4,25 Triliun.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB sebesar Rp 240 Miliar.

Isu utama dalam upaya pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati serta sasaran dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:

1. **Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati.** Indonesia merupakan salah satu negara *Megabiodiversity* yang terdepan dalam hal kelimpahan keanekaragaman hayati. Menurut Rahajoe dkk (2025), saat ini di Indonesia terdapat sebanyak 22 tipe ekosistem yang terdiri dari sekitar 74 tipe vegetasi, yang berdasarkan kombinasi antara karakteristik bentang alam dan vegetasi alamnya, tipe vegetasinya kemudian terbagi lagi menjadi 98 tipe kombinasi. Pada level spesies, hingga saat ini tercatat spesies flora sebanyak 31.031 jenis dan sebanyak 744.279 spesies fauna yang terdiri atas berbagai taksa. Sebagaimana dijelaskan oleh Sala (2020), keanekaragaman hayati tersebut masih akan terus bertambah dengan semakin intensifnya pelaksanaan eksplorasi di lapangan. Berdasarkan data *Global Biodiversity Index* (GBI), Indonesia menempati urutan kedua dalam *The Most (& Least) Biodiverse Countries*, dengan nilai GBI sebesar 418,78 poin (Nash, 2022). Namun demikian, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat ancaman kepunahan yang serius akibat faktor *antropogenik* (berdasarkan data IUCN Red List, 2024). Tingginya tingkat ancaman kepunahan juga disebabkan oleh faktor bentuk geografis Indonesia, sehingga tingkat endemisitasnya tinggi serta sebaran populasi yang kadang terbatas pada wilayah yang sangat sempit, seperti contoh Orangutan Tapanuli, Badak Jawa, Komodo, Rusa Bawean, serta kebanyakan spesies di wilayah Wallacea. Potensi keanekaragaman hayati ini perlu dipelihara dan dikelola dengan baik karena nilainya intrinsiknya yang sangat tinggi. Potensi keanekaragaman hayati penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia.
2. **Areal preservasi sebagai opsi yang efektif untuk konservasi insitu.** Habitat keanekaragaman hayati tersebut di atas, belum sepenuhnya terlindungi dalam sistem jaringan kawasan konservasi yang memadai. Masih banyak spesies tumbuhan alam dan satwa liar penting yang habitatnya berada pada kawasan budidaya. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2022 hingga 2025, areal dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (berbasis spesies) seluas 70-an juta hektar belum terlindungi oleh jaringan kawasan konservasi. Sebagian besar *Key Biodiversity Area* dan *Important Bird Area* di Indonesia belum terlindungi oleh jaringan kawasan konservasi. Hal ini tentu saja juga disebabkan oleh faktor kepentingan ekonomi dan sosial, yang tidak kalah penting dari kepentingan ekologi. Indonesia dengan populasi sekitar 285 juta jiwa juga membutuhkan sumber daya alam tersebut sebagai sumber- sumber penghidupan. Sebagai negara agraris, rasio ketersediaan lahan pertaniannya masih sangat rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Berdasarkan data statistik pertanian FAO (2022), *Agricultural Land* per Capita di Indonesia adalah seluas 0,20 hektar, masih sangat jauh di bawah rata-rata global sebesar 0,6 hektar atau rata-rata di wilayah Asia seluas 0,35 hektar. Sangat jauh di bawah Australia yang rasionya seluas 13,87 hektar per kapita. Dengan kondisi tersebut, Indonesia masih akan sulit untuk memenuhi target perlindungan wilayah dalam jaringan kawasan konservasi sebesar 30% pada tahun 2030 (30 by 30), sebagaimana target *Global Biodiversity Framework* 2030 (KM-GBF). Namun demikian, Indonesia masih mungkin memenuhi target tersebut dengan skema areal preservasi. Pada tingkat global dikenal adanya skema OECM (*Other Effective Area- based Conservation Measures*), yaitu wilayah yang secara geografis bukan merupakan kawasan konservasi namun secara efektif dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip

konservasi keanekaragaman hayati secara insitu, walaupun wilayah tersebut merupakan kawasan budidaya. Di Indonesia, skema OECM tersebut sangat identik dengan skema areal preservasi. Areal preservasi pada dasarnya tidak membutuhkan wilayah yang luas, namun lebih ditekankan pada keterhubungan habitat pada skala lansekap atau pada skala pulau.

3. ***Protected Area Management Effectiveness (PAME Framework)***. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai harapan. Database pelaksanaan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) di Indonesia selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan konservasi yang efektif pengelolaannya hanya sebatas pada kawasan taman nasional dan kawasan taman wisata alam. Nilai evaluasi METT kawasan taman nasional rata-rata sebesar 78,9 (kategori sangat efektif), sedangkan kawasan lainnya adalah rata-rata sebesar 63,76 (kategori cukup efektif). Nilai METT terutama disebabkan oleh karena faktor fokus pelaksanaan tugas dan fungsi. Kawasan taman nasional pada umumnya dikelola oleh unit kerja tersendiri, yang fokus pada konservasi insitu, sedangkan kawasan lainnya dikelola oleh Balai Besar/Balai KSDA yang juga dibebani dengan fungsi konservasi eksitu, yang wilayahnya terkadang mencakup beberapa provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan strategi yang tepat dalam hal pengalokasian sumber daya.
4. ***Pemanfaatan SMART, Grid Design System, dan IPM***. Sistem perlindungan kawasan konservasi, terutama upaya patroli dan penjagaan kawasan dapat saja menjadi tidak efektif dalam menekan tingkat gangguan tertentu pada kawasan konservasi. Hal ini terjadi di banyak kawasan konservasi. Sistem perlindungan kawasan konservasi yang tidak efektif dapat menyebabkan percepatan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, akan diupayakan untuk secara optimal menggunakan perangkat *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART) serta *Integrated Prevention Model* (IPM). Untuk pelaksanaan sistem perlindungan, Direktorat Jenderal KSDAE saat ini sedang mematangkan rancangan *Grid Design System* untuk kebutuhan patroli dan penjagaan kawasan. Perencanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan patroli dan penjagaan kawasan konservasi akan dilakukan berdasarkan grid tersebut, sehingga memudahkan pengendalian pengelolaan kawasan. Dengan *Grid Design System*, cakupan pelaksanaan kegiatan perlindungan akan mudah dievaluasi dan diarahkan ke wilayah-wilayah tertentu, serta sebagai upaya antisipasi pelaksanaan aktivitas di tapak yang clumping.
5. ***Area terbuka pada kawasan konservasi***. Dalam konteks kawasan konservasi, area terbuka dengan konotasi negatif merujuk pada lahan atau area terbuka yang terbentuk akibat gangguan atau kerusakan ekosistem, baik karena aktivitas manusia (biasanya merupakan hasil dari perusakan atau konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya) maupun proses alami yang tidak mendukung kelestarian fungsi kawasan. Area terbuka memerlukan penanganan berupa pemulihan ekosistem dan/atau penyelesaian usaha/kegiatan terbangun (kemitraan konservasi/kerja sama/perijinan berusaha/penegakan hukum). Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal KSDAE telah merilis peta indikatif area terbuka di kawasan konservasi seluas 1,84 juta hektar berdasarkan hasil desktop analysis. Antara tahun 2018 hingga 2024, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian juga melakukan validasi lapangan serta analisis spasial lanjutan untuk memastikan kondisi tersebut. Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian merilis peta area terbuka seluas 1,3 juta hektar.

6. **Efektivitas pemberdayaan masyarakat.** Dampak dan manfaat dari upaya pemberian akses pemanfaatan kawasan konservasi serta pembinaan usaha ekonomi belum benar-benar efektif untuk mengurangi tekanan ke dalam kawasan konservasi. Dalam beberapa tahun terakhir, data temuan lapangan menunjukkan masih tingginya gangguan terhadap areal di dalam kawasan konservasi yang berdampingan dengan wilayah-wilayah pemukiman masyarakat (*edge effect*). Kondisi tersebut menunjukkan tingkat efektivitas upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga pola pemberdayaan yang dilakukan perlu ditinjau kembali. Sebagai salah satu solusinya, Direktorat Jenderal KSDAE akan menerapkan IPM dalam upaya pemberdayaan masyarakat. IPM dirancang dan dikembangkan untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui intervensi terhadap akar penyebab dari masalah kejahatan tersebut. Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat dengan pola IPM telah diadopsi dan terbukti efektif dalam menekan tingkat gangguan kawasan konservasi di TN Way Kambas dan TN Gunung Leuser.
7. **Devisa dan PNPB dari pemanfaatan TSL.** Devisa dan penerimaan negara dari pemanfaatan TSL belum cukup memadai dan sebanding dengan nilai intrinsik keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan. Hal ini membutuhkan intervensi optimalisasi regulasi dan sistem tata kelola. Saat ini, Direktorat Jenderal KSDAE sedang melakukan upaya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNPB yang Berlaku di Kementerian LHK, serta revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri. Revisi terhadap jenis PNPB, tarif PNPB serta harga patokan akan dilakukan atau ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian valuasi ekonomi bersama Universitas Indonesia. Selain itu, beberapa hal juga diupayakan untuk optimalisasi penerimaan negara, seperti identifikasi sumber PNPB lain dari perpanjangan perizinan berusaha, pengenaan tarif atas penggunaan CITES *stamp*, serta optimalisasi pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran.
8. **Kinerja PB-PSWA.** Sampai dengan September 2025, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 108 Perizinan Berusaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA). Saat ini, 49 PB-PSWA telah beroperasi dalam kegiatan usaha, dan 59 PB-PSWA belum beroperasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap 30 PB-PSWA pada tahun 2024, 11 PB-PSWA dinilai berkinerja “BURUK” dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP). Sampai dengan September 2025, 7 PB-PSWA telah memenuhi Surat Peringatan Pertama, 2 PB-PSWA mendapatkan SP Kedua, 1 PB-PSWA mendapatkan SP Ketiga, dan 1 PB-PSWA mendapatkan SP Pertama. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, 10 PB-PSWA yang tidak menyampaikan laporan keuangan telah ditindaklanjuti dengan SP dan sampai dengan bulan September 2025, 5 PB-PSWA telah memenuhi SP Pertama, 1 PB-PSWA dalam proses memenuhi SP Pertama, 3 PB-PSWA telah memenuhi SP Kedua, dan 1 PB-PSWA telah memenuhi SP Ketiga. Terdapat 14 PB-PSWA yang belum pernah memperoleh keuntungan dan tidak menyetorkan PNPB pendapatan hasil usaha (PHU-PSWA). Untuk meningkatkan kinerja PB-PSWA, Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan beberapa upaya, yaitu: (a) bobot PHU-PSWA menjadi proporsi penilaian terbesar dalam evaluasi kinerja. Pemegang izin yang tidak memperoleh keuntungan dan membayar PHU-PSWA tidak dapat memperoleh nilai kinerja “Baik”; (b) Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Jasa Lingkungan, mengatur bahwa pemegang PB-PSWA yang tidak membangun sarana dan prasarana dalam 5 tahun dan tidak membayar PHU-PSWA dalam 8 tahun, akan dikenakan sanksi “Pencabutan Izin”; serta

(c) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 telah mengatur bahwa PB-PSWA yang tidak menyampaikan RKL, RKT, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dikenakan denda 10% dari Tarif Iuran PB-PSWA.

9. **Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi belum optimal.** Dalam pemanfaatan jasa lingkungan energi air, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan seperti regulasi yang belum mengatur kembali pemanfaatan energi air pada kawasan konservasi paska pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, perpanjangan PB-PJLEA belum dapat difasilitasi karena masih terhambat regulasi, perjanjian jual beli harga dasar listrik yang belum diterbitkan oleh PLN menyebabkan belum beroperasinya pemegang izin, serta dokumen penetapan areal pemanfaatan air yang belum ditetapkan. Dalam hal pemanfaatan panas bumi, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan seperti: (a) belum tersedianya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di kawasan konservasi; (b) pemberlakuan PNB Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi masih menunggu regulasi tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas PNB Bidang KSDAE dan Besaran Nilai A, B1, B2, dan B3 pada PNB Pungutan PB- PJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan di TN, TWA, dan Tahura; (c) penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) yang tidak dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan; serta (d) tekanan masyarakat kepada pemerintah atas konflik sosial yang terjadi dengan (akan) adanya pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi kawasan pelestarian alam.

Memperhatikan isu utama tersebut di atas, Direktorat Jenderal KSDAE perlu merumuskan arah kebijakan. Namun demikian, arah kebijakan konservasi keanekaragaman hayati telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta pada berbagai referensi yang berlaku global, terutama Konvensi Keanekaragaman Hayati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNCBD). Perumusan kebijakan strategis Direktorat Jenderal KSDAE akan didasarkan atas prinsip-prinsip dan etika konservasi, serta tujuan utama konservasi. Upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia; (2) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman spesies dan sumber genetik serta keterwakilan tipe-tipe ekosistem alami sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan umat manusia yang menggunakan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan; serta (3) Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Internalisasi dukungan dan strategi Direktorat Jenderal KSDAE dalam mendukung kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan telah dirumuskan dan tertuang secara tekstual dalam arsitektur target kinerja. Tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana diuraikan di atas, secara keseluruhan berhubungan erat dengan kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan.

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Balai TN Baluran

Arah kebijakan dan strategi Balai TN Baluran disusun secara berjenjang dan berlandaskan pada arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Hal ini memastikan agar kebijakan, keselarasan strategi, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat tapak berjalan sesuai dengan arahan Direktorat Jenderal KSDAE. Adapun Visi Balai TN Baluran secara langsung mengambil dan mengimplementasikan elemen utama dari Visi Ditjen KSDAE ke dalam konteks pengelolaan taman nasional. Sedangkan Misi Balai TN Baluran merupakan penjabaran operasional dari Misi Ditjen KSDAE, yang fokus pada empat pilar utama, yaitu Ekologi, Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola. Secara keterkaitan pencapaian strategi Direktorat Jenderal KSDAE dengan tugas dan fungsi BTN Baluran meliputi kegiatan :

1. Ekologi dan Perlindungan: Balai TN Baluran mewujudkan misi menjaga fungsi ekologis melalui strategi peningkatan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, yang sejalan dengan Sasaran Program 1 Ditjen KSDAE mengenai penurunan tingkat kerusakan hutan.
2. Ekonomi dan Sosial: Mengembangkan jasa lingkungan dan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan secara partisipatif adalah strategi langsung Balai TN Baluran untuk mencapai misi Ditjen KSDAE dalam meningkatkan manfaat ekonomi dan mengoptimalkan fungsi sosial, terutama melalui peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan (Sasaran Program 2 dan 3).
3. Tata Kelola: Strategi Balai TN Baluran untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional dan transparan merupakan implementasi konkret dari misi Ditjen KSDAE untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Balai TN Baluran juga secara spesifik menambahkan strategi peningkatan kemitraan dan kolaborasi untuk memperkuat implementasi di tingkat tapak.

Strategi Balai TN Baluran berfungsi sebagai penjabaran yang lebih detail dan terfokus pada kawasan Baluran, memastikan bahwa setiap kegiatan operasional di lapangan berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan strategis Ditjen KSDAE dan Kementerian Kehutanan secara keseluruhan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029 oleh Direktorat Jenderal KSDAE tergambarkan dalam Peta Strategi Pembangunan KSDAE Tahun 2025-2029 (Gambar 23), serta tiga sasaran program dan lima indikator kinerja program. Sasaran program dan indikatornya tersebut mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan.

Pemerintah telah menetapkan RPJMN Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025. Direktorat Jenderal KSDAE dimandatkan untuk bertanggung jawab pada sembilan dari 22 indikator kinerja Kementerian Kehutanan (diuraikan dalam Lampiran III RPJMN Tahun 2025–2029), dimana kinerja tersebut mendukung secara langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sembilan indikator kinerja Kementerian Kehutanan 2025-2029 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE tersebut sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9. Indikator Kinerja RPJMN Tahun 2025-2029 pada Direktorat Jenderal KSDAE

No	Nama Indikator	Level Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1.	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Kegiatan Prioritas	Unit	304	325	350	375	400
2.	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Kegiatan Prioritas	Hektar	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Luas Pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	Kegiatan Prioritas	Hektar	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.	Indeks Daftar Merah Nasional status keterancaman spesies	Kegiatan Prioritas	Poin	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76
5.	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kegiatan Prioritas	Kelompok Masyarakat (kumulatif)	200	775	1350	1925	2500
6.	Nilai PNPB dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Kegiatan Prioritas	Miliar Rupiah	26	26	27	27	28
7.	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Kegiatan Prioritas	Juta Hektare (kumulatif)	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
8.	Nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Kegiatan Prioritas	Miliar Rupiah	209	215	222	230	239
9.	Jumlah produk yang dikembangkan melalui <i>bioprospeksi</i>	Kegiatan Prioritas	Produk (kumulatif)	15	15	20	20	25

Sembilan indikator kinerja yang diamanatkan pada RPJMN ini wajib dituangkan pada indikator kinerja Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029. Direktorat Jenderal KSDAE telah merancang sasaran program serta indikator kinerja program dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan nasional yang telah ada pada RPJMN serta sasaran strategis pembangunan kehutanan. Kinerja yang dirancang harus dapat berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan, Direktorat Jenderal KSDAE menyusun rancangan target kinerja secara berjenjang pada tingkatan program, kegiatan dan keluaran. Mandat pengelolaan keanekaragaman hayati oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema:

“Mengelola Keanekaragaman Hayati:

Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”

Tema tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, serta visi, misi, dan strategi pembangunan kehutanan pada periode yang sama. Adapun sasaran program dan indikator kinerja program yang menjadi target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE pada periode 2025-2029 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 10.

Tabel 10. Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
(SP1) Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati								
1.	(SP1.1) Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	0	5	15	25	35	50
2.	(SP1.2) Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	0	3	8	15	30	50
(SP2) Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga								
3.	(SP2.1) Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Milliar Rupiah	0	200	210	220	230	240
(SP3) Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem								
4.	(SP3.1) Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i>	Triliun Rupiah	8,55	7,75	7,8	8	8,2	8,4
5.	(SP3.2) Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Milliar Rupiah	230,26	235	241	249	257	267

Setiap sasaran program didukung oleh sasaran kegiatan, dan indikator kinerja program didukung oleh indikator kinerja kegiatan secara berjenjang. Pada Sasaran Program 1 “meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati”, didukung oleh empat sasaran kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik (SP1.SK1); (2) optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem (SP1.SK2); (3) meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi (SP1.SK3); serta (4) meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB (SP1.SK4).

Keberhasilan pencapaian setiap sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja kegiatan, dan setiap indikator kinerja kegiatan berhubungan langsung dengan indikator kinerja program. Gambaran pertalian antara sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Sasaran Program 1 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 11.

Tabel 11. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 1

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
				2025	2026	2027	2028	2029	
SP1.SK1 Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik									
1.	SP1.SK1.1 Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	6.731	200	433	678	810	1.100	Dit. KSG
SP1.SK2 Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem									
2.	SP1.SK2.1 Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	Dit. PK
3.	SP1.SK2.2 Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	-	10	13	13	15	17	Dit. PK
SP1.SK3 Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi									
4.	SP1.SK3.1 Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	0	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Dit. PEBAP
5.	SP1.SK3.2 Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	311.634	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Dit. PEBAP
SP1.SK4 Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB									
6.	SP1.SK4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit (Kumulatif)	275	304	325	350	375	400	Dit. KK

Keterangan:

UKE II (Unit Kerja Eselon II); Dit. KSG (Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik); Dit. PK (Direktorat Perencanaan Konservasi); Dit. PEBAP (Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi); Dit. KK (Direktorat Konservasi Kawasan).

Pada Sasaran Program 2 “meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga” didukung oleh dua sasaran kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati (SP2.SK1); serta (2) terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat (SP2.SK2). Gambaran pertalian antara sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Sasaran Program 2 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 12.

Tabel 12. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 2.

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
				2025	2026	2027	2028	2029	
SP2.SK1 Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati									
1.	SP2.SK1.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	3.161	200	775	1.350	1.925	2.500	Dit. KK
SP2.SK2 Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat									
2.	SP2.SK2.1 Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	0	33	50	50	50	50	Dit. PJL

Keterangan:

UKE II (Unit Kerja Eselon II); Dit. KK (Direktorat Konservasi Kawasan); Dit. PJL (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan).

Pada aspek ekonomi, bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem akan berkontribusi pada meningkatkan produk barang dan jasa melalui pemanfaatan jasa lingkungan serta tumbuhan dan satwa liar. Pada Sasaran Program 3 “meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem” didukung oleh tiga sasaran kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan (SP3.SK1); (2) peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (SP3.SK2); serta (3) meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari

(SP3.SK3). Gambaran pertalian antara sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Sasaran Program 3 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 13.

Tabel 13. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 3.

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
				2025	2026	2027	2028	2029	
SP3.SK1 Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan									
1	SP3.SK1.1 Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)	10	15	15	20	20	25	Dit. KSG
2	SP3.SK1.2 Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	Individu (Kumulatif)	0	100	200	300	400	500	Dit. KSG
SP3.SK2 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan									
3	SP3.SK2.1 Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i>	Persen	0	10	25	30	35	40	Dit. PJL
4	SP3.SK2.2 Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Miliar Rupiah	204,3	209	215	222	230	239	Dit. PJL
5	SP3.SK2.3 Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Juta Hektar (Kumulaitf)	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	Dit. PJL
SP3.SK3 Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari									
6	SP3.SK3.1 Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Miliar Rupiah	25,96	26	26	27	27	28	Dit. KSG

Keterangan:

UKE II (Unit Kerja Eselon II); Dit. KSG (Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik); Dit. PJL (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan).

Pada aspek tata kelola dan kelembagaan, Direktorat Jenderal KSDAE juga berkontribusi pada pelaksanaan Program Dukungan Manajemen. Target kinerja pada Kegiatan Dukungan Manajemen merupakan dua sasaran generik dimana setiap sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat mengukur kualitas reformasi birokrasi serta pelayanan birokrasi yang adaptif dan akuntabel. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 14.

Tabel 14. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen.

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
				2025	2026	2027	2028	2029	
SK1 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas									
1	SK1.1 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3	3,80	3,82	3,83	3,84	3,85	Setditjen
SK2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem									
2	SK1.2 Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	82,31	82,31	82,4	82,5	82,6	82,7	Setditjen

Seluruh target kinerja program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE tersebut pada Tabel 8 sampai dengan Tabel 14 telah selaras dalam upaya pencapaian visi dan misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029.

4.2. Target Kinerja Balai Taman Nasional Baluran

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dari 3 (tiga) Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal KSDAE, Balai TN Baluran akan mendukung seluruh pencapaian 3 sasaran program tersebut, yaitu:

1. Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga
3. Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem

Untuk mendukung pencapaian target dari Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal KSDAE selama tahun 2025-2029, Balai TN Baluran akan turut berperan dengan melaksanakan 6 (Enam) kegiatan. yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan Konservasi
2. Kegiatan Konservasi Kawasan
3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik
4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
5. Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi
6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut akan dicapai melalui beberapa komponen kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai TN Baluran. Masing - masing kegiatan mempunyai sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, yang dijabarkan melalui Keluaran (Output) pada rencana kerja dan anggaran (RKA) setiap tahunnya.

Target kinerja pada Balai TN Baluran tahun 2025-2029 disusun secara kumulatif sehingga jika target kinerja pada tahun pertama sudah tercapai. Jika target selama 5 tahun dibagi dalam target tahunan, maka jika target tahun pertama sudah tercapai target tersebut tetap dituliskan pada tahun berikutnya ditambahkan target pada tahun berjalan secara kumulatif.

Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan beserta komponen kegiatan dari masing-masing kegiatan pada Balai TN Baluran tahun 2025-2029 sebagaimana uraian berikut ini.

A. Kegiatan Perencanaan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Perencanaan Konservasi. Sasaran kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati yaitu Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja kegiatan (output) dan target kinerja sebagai disajikan pada Tabel 15 berikut ini.

Tabel 15. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai TN Baluran Untuk Kegiatan Direktorat Perencanaan Konservasi.

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029					
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Perencanaan Konservasi							
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati							
	Sasaran Kegiatan: Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem						
1.	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
	a. Penguatan Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB	Dokumen	1	1	1	1	1
2.	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	10	13	13	15	17
	a. Optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis KSA, KPA dan TB	Dokumen	7	7	6	6	6

A.1. Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB

Alat ukur yang digunakan untuk penilaian efektivitas perencanaan suatu KSA, KPA dan TB diawali dengan penentuan kriteria, indikator, penentuan skala likert dan pembobotan. Penentuan kriteria penilaian didasarkan pada kegiatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Kegiatan perencanaan kawasan konservasi meliputi: pemolaan, inventarisasi potensi, penataan dan penyusunan rencana pengelolaan. Alat ukur yang kemudian dibangun adalah berupa kriteria, indikator, bobot, skor dan kategori hasil penilaian efektivitas perencanaan kawasan konservasi.

Pembobotan kriteria dan indikator dari masing masing kriteria dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP merupakan proses analisis dalam penentuan bobot berdasarkan masing-masing indikator/kriteria dengan perbandingan berpasangan yang menghasilkan bobot kuantitatif. Dalam penentuan bobot, pemberian nilai bobot dilakukan dengan menggunakan expert judgement dari para praktisi dan ahli di bidang masing-masing kriteria. Bobot masing-masing kriteria, indikator dan perhitungan penilaian efektivitas perencanaan KSA, KPA dan TB adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria : Inventarisasi Potensi Ekologi, Ekonomi, dan Sosial Budaya KSA, KPA, dan TB, dengan indikator:
 - Adanya dokumen rancangan/desain inventarisasi potensi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya KSA/KPA/TB
 - Pelaksanaan rencana kegiatan inventarisasi potensi ekologi, ekonomi dan sosial budaya KSA/KPA/TB
 - Tersedia data dan informasi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya KSA/KPA/TB dari hasil inventarisasi
 - Data dan Informasi potensi ekologi, ekonomi dan sosial budaya kawasan konservasi telah dianalisis untuk kepentingan perencanaan KSA/KPA/TB

- Data dan informasi potensi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya KSA/KPA/TB telah digunakan
- b. Kriteria : Pemolaan KSA, KPA, dan TB, dengan indikator:
 - KSA/KPA/TB memiliki fungsi yang jelas
 - Penataan batas KSA/KPA/TB telah diselesaikan
 - KSA/KPA/TB telah dikukuhkan
 - Dokumen pengukuhan dengan kondisi lapangan KSA/KPA/TB sesuai
 - Konflik tenurial [tata batas] KSA/KPA/TB diselesaikan
- c. Penataan Ruang Kelola KSA/KPA/TB (Zona atau Blok), dengan indikator:
 - Zona/Blok KSA/KPA/TB telah tersusun
 - Diseminasi dokumen zona/blok pengelolaan telah dilaksanakan
 - Pemberian tanda batas zona/blok pengelolaan
 - Kesesuaian antara dokumen zona/blok pengelolaan dengan kondisi faktual di lapangan
 - Evaluasi Zona/blok pengelolaan telah terlaksana
- d. Kriteria : Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KSA, KPA, dan TB, dengan indikator:
 - Adanya Rencana Pengelolaan Jangka Panjang
 - Diseminasi Dokumen RPJP telah dilaksanakan
 - Monitoring kesesuaian program dan kegiatan terlaksana
 - Pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RPJP
 - Evaluasi Dokumen RPJP terlaksana

Untuk penilaian keefektifan perencanaan kawasan, seluruh indikator yang berjumlah 20 diberi nilai kuantitatif. Skor tersebut kemudian dikalikan dengan bobot indikator menjadi nilai indikator. Penjumlahan dari seluruh nilai indikator adalah total nilai. Jika semua indikator memperoleh nilai 5, maka total nilai yang diperoleh akan maksimal, yaitu 500. Untuk memudahkan pemetaan keefektifan perencanaan kawasan, maka dilakukan pengelompokan total nilai perencanaan menjadi 3 kelas, yaitu: (1) kurang efektif dengan nilai <150 ; (2) cukup efektif dengan nilai 150 sampai dengan <400 , serta (3) efektif dengan nilai ≥ 400 .

Target jangka panjang dari total nilai dari efektivitas perencanaan setiap kawasan yang dikelola oleh UPT/ UPTD adalah di atas 400 atau termasuk dalam kategori efektif. Adapun nilai efektivitas perencanaan akan dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Konservasi di setiap akhir tahun untuk seluruh kawasan KSA, KPA, dan TB secara nasional menggunakan indeks efektivitas perencanaan (IEP).

Nilai efektivitas perencanaan kawasan akan menjelaskan tingkat efektivitas perencanaan di unit KSA/KPA/TB, sedangkan penilaian efektivitas perencanaan KSA, KPA dan TB secara menyeluruh dilakukan menggunakan Indeks Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB. Nilai IEP berada pada rentang 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada upaya perencanaan kawasan yang telah dilakukan, dan 1 yang berarti seluruh upaya perencanaan kawasan telah dilakukan secara baik dengan kualitas hasil yang maksimal. Berdasarkan baseline data tahun 2024, Indeks Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB berada pada nilai 0,56 dan diharapkan dapat meningkat hingga 0,65 pada tahun 2029.

A.2. Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Penentuan kriteria penilaian pada alat ukur tata kelola kerja sama di KSA, KPA dan TB berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 44 Tahun 2017, dengan penilaian atas tiga kriteria, yaitu:

- a. Kelembagaan dan kepastian hukum, dengan indikator:
 - Adanya PKS yang aktif dan sah
 - Adanya Rencana Pelaksanaan Program (RPP) yang aktif dan sah
 - Adanya Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) yang aktif dan sah
 - Adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang aktif dan sah
 - Adanya rencana pelaksanaan kegiatan (RPK/ ToR)
 - Keselarasan antara PKS dengan RPP
 - Keselarasan antara RKT dengan RPP
 - Adanya persetujuan lingkungan
- b. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama, dengan indikator.
 - Capaian output kegiatan sesuai rencana
 - Besaran anggaran yang terealisasi sesuai rencana
 - Jenis/ bentuk kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
 - Areal/ kegiatan kerja sama berada pada lokasi/ zona/ blok sesuai peruntukannya
 - Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala
 - Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala
 - Laporan tahunan disusun
- c. Transparansi dan akuntabilitas, dengan indikator:
 - Pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan/atau kesepakatan para pihak
 - Penggunaan anggaran kegiatan mengikuti standar yang berlaku.
 - Pengelolaan barang hasil kerja sama tertib
 - Temuan/ rekomendasi ditindaklanjuti

Penilaian efektivitas tata kelola perjanjian kerja sama dilakukan berdasarkan 19 indikator yang masing-masing diberikan nilai secara kuantitatif. Selanjutnya, total nilai diperoleh melalui penjumlahan seluruh nilai indikator yang kemudian dibagi dengan jumlah indikator, dan hasilnya dikalikan 100%. Total nilai yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkat efektivitas tata kelola perjanjian kerja sama. Apabila seluruh indikator memperoleh skor 1, maka total nilai yang dihasilkan adalah 100, yang menunjukkan tingkat efektivitas maksimal. Untuk memudahkan interpretasi, total nilai dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan efektivitas, yaitu (a) Kurang, dengan total nilai 0-60; (b) Cukup, dengan total nilai 61-80; serta Baik, dengan total nilai 81-100.

B. Kegiatan Konservasi Kawasan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Kawasan. Sasaran kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru yaitu Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB dan Meningkatkan keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja kegiatan (output) dan target kinerja sebagai disajikan pada Tabel 16 berikut ini.

Tabel 16. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai TN Baluran Untuk Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan.

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029					
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Konservasi Kawasan							
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB						
1.	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit Kumulatif	1	1	1	1	1
	a. Perlindungan dan Pengamanan KSA, KPA dan TB	Hektar	4.256	6.810	13.700	15.000	16.000
	b. Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	Hektar	55,45	640	640	640	640
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati						
2.	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	3	6	8	10	12
	a. Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	Orang	6	7	8	9	10
	b. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat	3	2	2	2	2

B.1. Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif

Metode pengumpulan dan pengolahan data untuk capaian indikator kinerja efektivitas pengelolaan kawasan konservasi merupakan suatu metode yang berlaku secara global dan diadaptasikan sesuai dengan kondisi dan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Metode tersebut menggunakan perangkat METT versi 4 dari IUCN. Tools tersebut menilai atau mengevaluasi setiap pengelolaan kawasan dengan mekanisme *self assessment* dalam setiap periode 2 tahun.

Sumber data untuk menghitung nilai efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB adalah berasal dari rekomendasi hasil penilaian tahun-tahun sebelumnya, dokumen RKA KL, dokumen kepegawaian, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn), laporan hasil survey potensi, laporan hasil patroli, kerjasama, dan laporan kegiatan pengelolaan kawasan lainnya. Data penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB yang dilakukan oleh UPT/UPTD terhadap masing-masing lokasi target per tahun selanjutnya diverifikasi dan dikompilasi untuk ditetapkan sebagai baseline terakhir oleh Direktorat Konservasi Kawasan sebagai penanggung jawab kegiatan.

Cara pengukuran dan pengolahan data Penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB menggunakan metode METT 4. Penilaian akan dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang

berperan penting dalam siklus pengelolaan. Adapun aspek-aspek penilaian dikelompokkan dalam 5 aspek utama, yaitu: 1) Perencanaan terhadap pengelolaan kawasan, meliputi status kawasan, tujuan kawasan, desain (bentuk, luas, dan lokasi), rencana pengelolaan, perencanaan penggunaan lahan dan air, dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek; 2) Alokasi sumberdaya (*input*), yang meliputi inventarisasi sumber daya, jumlah dan kapasitas pegawai, alokasi anggaran yang tersedia, kapasitas anggaran, dan peralatan pendukung pengelolaan; 3) Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (proses); 4) Produk dan jasa (*output*) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan; serta 5) Dampak atau *outcome* yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

Proses penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu prakondisi, proses penilaian, penyusunan resume penilaian dan rekomendasi, hingga verifikasi. Sebagai alat bukti atau *verifier*, capaian indikator kinerja efektivitas pengelolaan kawasan didasarkan pada laporan hasil penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB sebagaimana form penilaian METT Versi 4 beserta kelengkapannya, berita acara verifikasi hasil penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB, serta Keputusan Direktur Jenderal KSDAE tentang Penetapan Nilai Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA dan TB.

B.2. Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati

Pencapaian IKK jumlah kelompok yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati didukung oleh tiga Rincian Output (RO), yaitu:

- a. RO 1 : Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati (PSM). RO ini dilaksanakan oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE melalui kegiatan Pembentukan Kader Konservasi, Pembinaan Kader Konservasi, serta Pembinaan Kelompok Pecinta Alam.
- b. RO 2 : Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (PM). RO ini dilaksanakan oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE melalui kegiatan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam komponen ini antara lain pembentukan kelompok, penyusunan rencana kelompok, peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok, serta pengembangan ekonomi kelompok. Selain pengembangan kelembagaan, dilaksanakan pula kegiatan pendampingan, serta pengembangan ekonomi kelompok,
- c. RO 3 : Rekomendasi kebijakan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. RO ini dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Kawasan melalui kegiatan penyusunan NSPK serta pemberian arahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.

Satuan IKK jumlah kelompok yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati adalah kelompok masyarakat. Jumlah kelompok masyarakat dimaksud diperoleh dengan menjumlahkan capaian RO1 dan RO2. Ukuran ketercapaian IKK ini adalah laporan kegiatan terkait peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh UPT.

C. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Sasaran kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik yaitu Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik dan Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan. Kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja kegiatan (output) dan target kinerja sebagai disajikan pada Tabel 17 berikut ini.

Tabel 17. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai TN Baluran Untuk Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029					
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik							
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik						
1.	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	5	10	15	20	25
	a. Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati	Data	5	5	5	5	5
	b. Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	Lokasi	1	1	1	1	1
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan						
6.	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)	-	-	-	-	1
	a. Pengembangan Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Spesies Liar	Spesies	-	-	-	-	1

C.1. Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya

Metode pengumpulan dan pengolahan data mengacu pada dokumen panduan inventarisasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pelaksanaan inventarisasi terhadap spesies yang belum diatur dalam panduan tersebut dapat menggunakan acuan lain yang terpercaya yang diterbitkan oleh berbagai lembaga seperti lembaga otoritas keilmuan (seperti BRIN), institusi pendidikan, serta lembaga lainnya.

Dalam pemenuhan *verifier* sebaran spesies, pengolahan dan analisis data akan dilakukan dengan pendekatan analisis spasial. UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE pada dasarnya telah melakukan analisis serupa pada periode lima tahun sebelumnya melalui pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Areal dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi secara Partisipatif. Selain daftar spesies dan estimasi populasinya, informasi yang dihasilkan dalam analisis ini adalah luas habitat spesies prioritas pada wilayah kerjanya. Secara teknis, pelaksana dapat menggunakan tools *Minimum Convex Polygon* (MCP) atau yang lebih mutakhir seperti *Local Convex Hull* (LoCoH) yang tersedia pada beberapa aplikasi Geographic Information System (GIS), serta pendekatan pemodelan distribusi spesies (*Species Distribution Model/SDM*) dengan berbagai tool yang telah tersedia dan umum digunakan.

C.2. Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi

Bioprospeksi mencakup seluruh proses eksplorasi, ekstraksi, penapisan (screening), pengembangan, hingga komersialisasi produk berbasis sumber daya genetik (SDG) yang bernilai

bioaktif dan memiliki potensi industri (farmasi, kosmetik, pangan, maupun bahan baku teknologi biologis). Bioprospeksi merupakan potensi nilai tambah ekonomi dari hasil eksplorasi, ekstraksi, penapisan, hingga pengembangan produk berbasis sumber daya genetik spesies liar yang memiliki nilai bioaktif, farmasi, kosmetik, maupun industri lainnya. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menggambarkan capaian ekonomi semata, tetapi juga keseimbangan antara pemanfaatan dan pengawetan sumber daya alam hayati yang menjadi mandat Direktorat Jenderal KSDAE.

Bioprospeksi adalah pemanfaatan berbasis riset dan pengembangan sumber daya genetik spesies liar yang menghasilkan produk bioaktif, yang akan diukur berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan pada setiap tahapan proses (eksplorasi–komersialisasi) dan nilai ekonomi produk yang siap dikembangkan atau dipasarkan. Adapun ketercapaiannya akan diverifikasi melalui dokumen laboratorium, laporan kegiatan riset bioprospeksi serta laporan pengawasan dan pengendalian dari UPT

D. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Sasaran kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yaitu Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat dan Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan. Kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja kegiatan (output) dan target kinerja sebagai disajikan pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18. Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai TN Baluran Untuk Kinerja Kegiatan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029					
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan							
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru							
	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat						
1.	Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	-	-	1	1	-
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan						
2.	Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i>	Persen	10	25	30	35	40
3.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Miliar Rupiah	3,35	3,86	4,19	4,91	5,06

D.1. Jumlah Desa Di Sekitar KPA Yang Mendapat Manfaat Dari Jasa Lingkungan

Jumlah desa di sekitar kawasan pelestarian alam yang memperoleh manfaat dari jasa lingkungan dimaksud akan diukur tidak pada seluruh jenis-jenis jasa ekosistem seperti pada definisi umumnya. Jasa lingkungan dimaksud dalam hal ini adalah jenis jasa lingkungan dari kawasan konservasi yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh warga masyarakat di desa-desa daerah penyangga kawasan konservasi. Jenis jasa lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah jasa lingkungan wisata alam serta jasa lingkungan air.

D.2. Persentase Pintu Masuk Objek Wisata Yang Menerapkan *E-Ticketing* dan *Cashless Payment*

Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment* didasarkan pada jumlah obyek wisata pada kawasan konservasi saat ini, yaitu 580 pintu masuk obyek wisata. Penerapan *e-ticketing* dan *cashless payment* dimaksud dalam hal ini adalah layanan masuk dan berkegiatan bagi pengunjung obyek wisata di kawasan konservasi secara digital dan daring, melalui sebuah platform digital yang disiapkan oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Batasan pengukuran akan dilakukan terhadap seberapa banyak pintu masuk obyek wisata alam yang telah menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment* dimaksud.

D.3. Nilai PNBP Dari pemanfaatan Jasa Lingkungan KSA, KPA dan TB

Indikator ini mengukur tingkat peningkatan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi. PNBP pemanfaatan jasa lingkungan terdiri atas iuran dan pungutan dari wisata alam, pemanfaatan air, panas bumi, dan lain-lain. Indikator ini dibatasi pada lingkup kewenangan Direktorat Jenderal KSDAE serta unit pelaksana teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

E. Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi. Sasaran kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi yaitu Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi. Kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja kegiatan (output) dan target kinerja sebagai disajikan pada Tabel 19 berikut ini.

Tabel 19. Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai TN Baluran Untuk Kinerja Kegiatan Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi.

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029					
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi							
Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi						
1.	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	-	800	4.400	500	14.000
2.	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	200	50	50	50	50

E.1. Luas Areal Preservasi Yang Dikembangkan

Pengumpulan dan pengolahan data dalam pencapaian indikator kinerja akan diverifikasi pada setiap tahapan yang telah ditetapkan, yang meliputi tahapan persiapan, tahapan verifikasi lapangan serta tahapan akhir. Ketercapaian target akan diverifikasi dengan surat keputusan, laporan dan notulensi, peta-peta serta profil Areal Preservasi.

E.2. Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA dan TB

Penghitungan capaian dilakukan dengan cara pengukuran dan pelaporan luasan areal yang dilakukan pemulihan ekosistem, berupa luasan hasil intervensi pemulihan ekosistem. Sedangkan verifikasi capaian output dilakukan dengan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pemulihan

ekosistem yang dibuat dalam bentuk dokumen laporan yang disahkan oleh Kepala UPT, peta spasial (digital), dan dokumentasi. Capaian yang dihitung adalah luas intervensi pemulihan ekosistem pada lokasi yang telah ditargetkan sesuai dengan dokumen RPE, baik melalui mekanisme alam, rehabilitasi, dan restorasi, maupun intervensi lanjutan (pemeliharaan) pemulihan ekosistem.

Hasil Pemulihan Ekosistem dilaporkan kepada Dirjen KSDAE c.q. Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi selaku pembina kegiatan Pemulihan Ekosistem. Verifikasi capaian dilaksanakan oleh Direktorat PEBAP, berdasarkan laporan UPT Ditjen KSDAE yang disertai dengan data/informasi spasial lokasi target.

F. Kegiatan Dukungan Manajemen

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen yaitu Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas dan Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja kegiatan (output) dan target kinerja sebagai disajikan pada Tabel 20 berikut ini.

Tabel 20. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai TN Baluran Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029					
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE							
Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas						
1.	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,90	3,92	3,94	3,97	4,00
	a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem						
2.	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	89,13	89,33	89,53	89,73	89,93
	a. Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1
	b. Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1
	c. Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	d. Layanan Prasarana Internal	Unit	-	1	-	-	-

4.3. Kerangka Pendanaan

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan yang ideal untuk pelaksanaan upaya pencapaian target kinerja Balai Taman Nasional Baluran dalam tahun 2025-2029 adalah sebesar Rp. 90.260.841.000,-. Anggaran tersebut merupakan kebutuhan total untuk mencapai target kinerja dan kebutuhan belanja operasional perkantoran. Pemenuhan kebutuhan pendanaan tersebut dapat bersumber dari APBN (RM, PNBP), pembiayaan dari mitra kerja Direktorat Jenderal KSDAE, hibah tidak terencana, serta hibah langsung lainnya. Kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan upaya pencapaian target kinerja

Balai Taman Nasional Baluran dalam tahun 2025-2029, yang dirinci per tahun dan kegiatan secara indikatif disajikan dalam tabel. 21.

Tabel 21. Kerangka Pendanaan Target Kinerja Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025-2029.

No	Kegiatan	ANGGARAN (x 1.000)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Perencanaan Konservasi	-	370.000	250.000	200.000	150.000
2.	Konservasi Kawasan	2.716.145	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
3.	Konservasi Spesies dan Genetik	280.000	40.000	80.000	80.000	140.000
4.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	-	-	100.000	120.000	140.000
5.	Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	63.277	1.007.500	750.000	800.000	850.000
6.	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE	10.874.300	16.233.619	16.500.000	16.600.000	16.700.000
TOTAL		13.933.722	18.955.119	18.984.000	19.104.000	19.284.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan memberikan rumusan kemana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan keadaan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Implementasi dari Renstra Balai Taman Nasional Baluran setiap tahun nantinya akan disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan prioritas program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Taman Nasional Baluran. Renstra ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan secara terarah, terukur, dan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE).

Pelaksanaan Renstra ini dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, meningkatnya tekanan terhadap kawasan konservasi, serta dinamika kebijakan lintas sektor yang mempengaruhi tata kelola kawasan. Namun demikian, dengan dukungan kebijakan nasional, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, Balai Taman Nasional Baluran berkomitmen untuk melaksanakan mandatnya secara konsisten dan adaptif.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tidak hanya bergantung pada kinerja internal, tetapi juga pada kolaborasi lintas unit dan lintas sektor, termasuk sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga penelitian, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal di sekitar kawasan Taman Nasional Baluran. Sinergi dan partisipasi aktif para pihak akan memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Baluran sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Dengan disusunnya Renstra Balai Taman Nasional Baluran 2025–2029 ini, diharapkan terwujud pengelolaan kawasan Taman Nasional Baluran yang efektif, adaptif, dan inklusif, sehingga mampu memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Implementasi dari Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun setiap tahun, sebagai bentuk operasionalisasi kebijakan dan instrumen pengendalian kinerja organisasi.

Akhirnya, kami menyadari bahwa tantangan pengelolaan Taman Nasional Baluran di masa depan semakin kompleks. Namun dengan semangat profesionalisme, integritas, dan kolaborasi seluruh jajaran bersama para pemangku kepentingan, kami meyakini bahwa seluruh tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

INDIKASI LOKASI TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE PADA BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
DIREKTORAT PERENCANAAN KONSERVASI								
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati								
1	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
				BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran
		Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	10	13	13	15	17
				BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN								
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru								
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit	304	325	350	375	400
				BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran
3	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	200	775	1.350	1.925	2.500
				BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran
DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK								
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik								
4	Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies	200	433	678	810	1.100
				BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran
5	Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk	15	15	20	20	25
				-	-	-	-	BTN Baluran
		Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	Individu	100	200	300	400	500
				-	-	-	-	-

6	Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari	Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Miliar Rp	26	26	27	27	28
				-	-	-	-	-
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN								
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru								
7	Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat	Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	33	50	50	50	50
				-	-	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran
8	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan	Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment	Persen	10	25	30	35	40
				BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran
		Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Milliar Rp	209	215	222	230	239
				BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran
		Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Juta Hektar (Kumulaitf)	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
				-	-	-	-	-
DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN PEMBINAAN AREAL PRESERVASI								
Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi								
9	Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran
		Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
				BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM								
Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE								
10	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,80	3,82	3,83	3,84	3,85
				BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran

11	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	82,31	82,40	82,50	82,60	82,70
				BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran	BTN Baluran

LAMPIRAN

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 2025-2029 BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM				
							2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List (Spesies Kumulatif)	Konservasi Spesies dan Genetik	Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	5	10	15	20	25
		Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List (Spesies Kumulatif)	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
					Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	10	13	13	15	17
			Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi	Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar		800	4.400	500	14.000
					Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	200	50	50	50	50
			Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit (Kumulatif)	1	1	1	1	1

2	Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat sekitar KSA, KPA, dan TB (Miliar Rupiah)	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan kehati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	3	2	1	1	2
3	Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	Nilai ekspor TSL dan bioprospecting (Triliun Rupiah)	Konservasi Spesies dan Genetik	Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)					1
		Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan (Miliar Rupiah)	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan	Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment	Persen					
					Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Miliar Rupiah					
4	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,90	3,92	3,94	3,97	4,00

5	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	89,13	89,33	89,53	89,73	89,93
---	---	-----------------------------------	--	--	--	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

